



**PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA  
DIKALANGAN REMAJA DAN  
PENANGGULANGANNYA  
DI JAWA TENGAH**

**TESIS**

Diajukan dalam rangka memenuhi  
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

H M Rukiman, SH  
Nim: B4A 004 041

PEMBIMBING :

PROF. DR. PAULUS HADI SUPRAPTO, SH, MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**2005**

UPT-PUSTAK-UNWIP	
No. Daft:	5422/T/MIH/1e
Tgl.	22/8.07

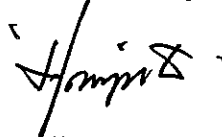
**PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DIKALANGAN  
REMAJA DAN PENANGGULANGANNYA  
DI JAWA TENGAH**

Oleh :

H M Rukiman, SH  
Nim: B4A 004 041

Tesis ini Telah diterima  
Sebagai Persyaratan untuk menempuh ujian tesis  
Program Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH, MH

Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat  
dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri" (QS Al-Baqarah [2]:222).*

*"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.  
Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang  
diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang yang mempersekutukan Allah,  
gangguan yang banyak dan menyakitkan hati, jika kamu bersabar dan  
bertaqwa. Maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut  
diutamakan." (QS Ali Imran [3]: 186).*

*Kupersembahkan kepada:  
Agama, Negara, dan Bangsa  
Ayah almarhum tercinta  
Ibu, kakak-kakakku dan adikku tercinta  
Istri dan anak-anakku atas cinta dan  
perhatian yang diberikan  
Teman-teman yang telah banyak menolongku  
Almamater tercinta*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan ini penulis memperoleh dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kapolda Jateng atas kebijakannya memberikan kesempatan serta semangat dan dorongan untuk mengambil Program Studi Magister Ilmu Hukum di Undip Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum serta masukan dan bimbingan yang merupakan salah satu prasyarat penyelesaian studi.
3. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH, MH yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan tesis ini, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan dari awal sampai selesainya penulisan tesis ini.

4. Dir Narkoba Polda Jateng yang telah memberikan masukan dan data yang dibutuhkan oleh penulis.
5. Karo Binamitra Polda Jateng selaku kalakhar BNP Jateng yang juga telah memberikan masukan dan data yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Bapak/Ibu dosen Program studi magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang yang telah memberikan bekal pendidikan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat penulis dalam perkuliahan yang dalam perkuliahan telah memberikan bantuan baik dukungan dan semangat dalam mengikuti dan menyelesaikan kuliah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna sehingga terbuka untuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tulisan ini, dan penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Semarang, 25 November 2005  
Penulis

H.M. Rukiman, SH  
Nim: B4A 004 041

## ABSTRAK

Penyalahgunaan Psikotropika saat ini sudah merambah ke dunia remaja, tidak tanggung-tanggung, siswa dari bangku SMP dan bahkan SD sudah terkena dampak penyalahgunaan ini. Dengan keadaan yang sudah sedemikian parahnya, sehingga perlu adanya usaha secara serius dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika. Adanya usaha sanksi pidana yang dilakukan tidak banyak membantu.

Atas dasar itu perlu dicari kejelasan permasalahan-permasalahan: (1) Bagaimanakah gambaran terjadinya penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah; (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika; (3) Hambatan-hambatan apakah yang dijumpai dalam langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di Jawa Tengah; (4) Bagaimanakah langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris*, yang tujuan utamanya adalah menganalisis data primer.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi penyalahgunaan Psikotropika kalangan remaja Jawa Tengah sudah memprihatinkan. Kebanyakan dari mereka masih pada tahap *experience seekers*, namun ada juga yang pada tahap ketagihan. Faktor yang melatarbelakanginya pun beragam, yaitu: (1) Keeratan ikatan dalam keluarga; (2) Proses belajar menjadi pengguna Psikotropika. Sulitnya menangani kasus ini disebabkan oleh banyaknya hambatan yang dijumpai dalam penanggulangan di Jawa Tengah, yang berasal dari dua sumber, yaitu: Faktor Undang-Undang dan Faktor sosial dan psikologis di luar Undang-Undang. Penanggulangan pun harus disesuaikan dengan karakteristik hambatan yang ada di Jawa Tengah, sehingga menggunakan dua sarana pula, yaitu: Sarana Penal dan Sarana Non-Penal

Kata Kunci: Penyalahgunaan Psikotropika remaja, Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika, Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika.

## ABSTRACT

Psychotropics has intruded the adolescent world, the target is not only intermediate school students, but also elementary school students. The condition is getting worse, so that we must solve the problem seriously, since criminal sanction doesn't really work. Based on that fact, we need to study: (1) How is the Psychotropics abuses intruded the youngster in Central Java; (2) The factors of Psychotropics abuses intruded the youngster in Central Java; (3) The obstacles in implementing the legal system in Psychotropics abuses intruded the youngster in Central Java; (4) The steps to overcome the problems in Psychotropics issue.

The study applied juridical empiric method which the main idea is to analyze the primary data.

The findings are, the condition of the youngsters who are using Psychotropics in Central Java is getting worse everyday. Most of them are still experience seekers users, but there are some symptoms showing that there are some Psychotropics additive and that the number that shows the case is greater than ever. The factors that are influence the phenomena are: (1) the tightness attachment family; (2) Learning process to be drug users. There are a lot of obstacles in implementing the legal system in Psychotropics abuses, which are: The Legal System and The Sociologic and Psychological factors. The steps to overcome, then, must cover the two above, which are: The Penal measures and The non-Penal measures

**Key Words:** Psychotropics abuses among youth, The factors influence the illegal abuses of Psychotropics, The emparatif and prevention of the Psychotropics abuses.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	40
F. Sistematika Penulisan.....	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	47
A. Pengertian Psikotropika.....	47
B. Pengaruh Psikotropika bagi Penggunaanya.....	53
C. Pengertian Remaja dan Kondisi Kejiwaan Remaja.....	56
1. Pengertian Remaja.....	56
2. Kondisi Kejiwaan Remaja.....	63
D. Pengertian Penyalahgunaan Psikotropika di kalangan Remaja.....	64
E. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja.....	67
1. Teori Kriminologi Tentang Sebab Kejahatan.....	67
2. Teori Kriminologi Tentang Sebab Kenakalan Remaja.....	73
F. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja.....	79
1. Politik Kriminal.....	79



2. Penggunaan Sarana Penal.....	84
3. Penggunaan Sarana Non Penal.....	86
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>88</b>
A. Gambaran Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jawa Tengah.....	88
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perilaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Responden .....	100
C. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Psikotropika di Jawa Tengah.....	112
D. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jawa Tengah Masa Datang.....	127
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>153</b>
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>157</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengaruh globalisasi terhadap suatu bangsa baik secara langsung maupun tak langsung telah banyak menimbulkan perubahan-perubahan pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan teknologi) dan pendapatan ekonomi semata, tetapi berpengaruh juga pada perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Perilaku menyimpang tersebut banyak terjadi di kalangan generasi muda khususnya pelajar/remaja. Perilaku menyimpang tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika.

Penyalahgunaan Psikotropika merupakan permasalahan nasional dan Internasional, karena berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sekitar tahun 1971 tampak bahwa Indonesia sebagai negara transit point lalu lintas penyelundupan psikotropika Internasional dan peredarannya secara gelap mendapat dukungan para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya, yang sebagian besar adalah anak-anak Remaja.<sup>1</sup> Penyalahgunaan psikotropika merebak terjadi secara merata di semua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga anak jalanan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa.

---

<sup>1</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung : Alumni, 1983, hal 3.

Peredaran dan perdagangan psikotropika digolongkan ke dalam kejahatan internasional. Hal itu jelas-jelas diadopsi oleh resolusi *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Cairo yang berlangsung pada tanggal 29 April 1995 sampai dengan 8 Mei 1995<sup>2</sup>.

Trend perkembangan kejahatan Psikotropika di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Data diambil dari Mabes Polri menunjukkan bahwa, penyalahgunaan psikotropika setiap tahunnya mencapai 304% selama kurun waktu tahun 2000 sampai 2004. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut disebabkan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan di Indonesia yang belum menentu. Krisis ekonomi juga disinyalir sebagai salah satu penyebab maraknya perdagangan obat ilegal ini.<sup>3</sup>

Setiap tahun data pemakai psikotropika mengalami peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena ini seperti gunung es, apa yang terekam dan terdata bagian puncaknya saja. Sedangkan di bawahnya tidak diketahui berapa banyak remaja yang menjadi pecandu atau calon pecandu psikotropika. Apalagi semakin lihai para mafia psikotropika dalam mengedarkan barang haram ini. Bagi mereka yang sama sekali belum pernah mencicipi narkoba disediakan paket gratisan, baru setelah mereka kecanduan diadakan transaksi jual beli psikotropika. Sementara untuk mereka yang

---

<sup>2</sup> Sunarso, Siswantoro, S.H., *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal 2.

<sup>3</sup> Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni. 2002, hal 7.

tergolong ekonomi menengah ke bawah disediakan PAHE (Paket Hemat) dengan harga yang sangat terjangkau.

Modus operandi para mafia ini pun bervariasi dari yang dicampur ke dalam minuman, permen, tinta, pulpen, pensil, atau tato gambar tempel. Bila memakai tato gambar tempel tersebut, maka zat psikotropika akan meresap melalui pori-pori kulit dan baru terasa efeknya setelah satu jam lebih. Begitu mudah psikotropika merebak di kalangan remaja, sehingga banyak ditemui para pelajar yang mengalami kecanduan psikotropika. Kehidupan mereka menjadi berantakan karenanya.

Dadang Hawari<sup>4</sup> memperingatkan akan ancaman penyalahgunaan zat terlarang tersebut, yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat sudah merupakan masyarakat yang berorientasi kepada zat/obat atau disebut *drug oriented society*. Begitu parah kondisi yang terjadi di Amerika Serikat hingga akhirnya *The National Institute of Drug Abuse* (NIDA) melaporkan bahwa untuk mengatasi masalah narkoba dalam dunia pendidikan, Amerika Serikat mengkampanyekan *War on Drugs* di beberapa distrik negaranya.

Penyalahgunaan psikotropika bukan suatu masalah sepele yang bisa dilihat sebelah mata. Jika tidak segera dicari jalan pemecahannya, ia dapat menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Hal inilah

---

<sup>4</sup> Hadiansyah, "*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah*", Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hal 82.

yang dikhawatirkan Pohe<sup>5</sup> dalam makalahnya yang disampaikan pada seminar di Bandung;

Yang kita takutkan, keadaan menjadi buruk lagi setelah banyak generasi muda kecanduan obat-obat terlarang itu, akan terjadi *lost generation*. Bahkan bisa-bisa mengarah ke *lost nation* ketika babak pertarungan global semakin berlangsung secara intens.

Timbulnya dampak negatif dari penyalahgunaan psikotropika yang berskala nasional dan multidimensional telah membuat pemerintah menetapkan masalah tersebut sebagai ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin. Beberapa upaya serius pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan juga langkah-langkah antisipatif lainnya. Namun pada kenyataannya, penyalahgunaan ini masih banyak dijumpai dan merebak di kalangan masyarakat.

Penegakan hukum menyangkut masalah ini pun mengalami banyak kendala. Dalam hal ini, Alex Bambang Riatmodjo menyatakan,

Dari beberapa informasi yang dikumpulkan, memang tidak dapat disangkal adanya aparat keamanan atau mantan aparat keamanan yang terlibat secara langsung dalam peredaran psikotropika ini. Akibatnya, memang sulit untuk mencegah terjadinya pengedaran psikotropika maupun penyalahgunaan obat-obatan.<sup>6</sup>

Kenyataan ini menyebabkan semakin banyak peredaran psikotropika dan semakin luas penggunaannya, serta semakin susah penanggulangannya. Disamping itu tampaknya, negara masih kurang memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelaku, seperti diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun

---

<sup>5</sup> Pikiran Rakyat, 6 Maret 2000.

<sup>6</sup> Kompas, Senin, Jakarta, 26 Juli 1999, hal 23.

1997, tentang Psikotropika, yang mengancam perbuatan itu dengan sanksi pidana cukup berat, dikenakan pidana penjara dan juga pidana denda.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian psikotropika, menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, karena setiap saat ia dapat mengancam generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa. Generasi muda ini nantinya diharapkan sebagai pewaris dan penerus dari cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dengan mengisi kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mencapai masyarakat adil, sejahtera dan makmur. Memelihara kelangsungan hidup martabat bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari pembinaan remaja, sebab pada akhirnya remaja akan tumbuh menjadi manusia dewasa, yang diharapkan akan meneruskan kepemimpinan disegala bidang. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan psikotropika tersebut dan merespons keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika.

Gejala penyalahgunaan psikotropika yang terjadi di kalangan remaja jelas-jelas mengancam kehidupan bangsa Indonesia, oleh karena itu perlu ditanggulangi. Dalam rangka penanggulangan itu pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah, antara lain :

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan gelap narkoba dan psikotropika, Indonesia

memandang perlu meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)<sup>7</sup>. Sesuai konvensi ini, negara yang sudah meratifikasi wajib memerangi peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya.<sup>8</sup>

Pernyataan pemerintah tentang penyalahgunaan psikotropika sebagai masalah nasional yang sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa adalah tepat, sesuai dengan uraian yang terdapat dalam himpunan Ketetapan-ketetapan MPR tahun 1983, bahwa : “Pembinaan dan pengembangan generasi muda menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, untuk itu perlu ditingkatkan kebijaksanaan nasional yang menyeluruh dan terpadu”.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui perkembangan penyalahgunaan psikotropika, di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya, di bawah ini penulis menyajikan data yang didapat dari BNN dan Mabes Polri, serta Kepolisian Jawa Tengah.

### **Kondisi Peredaran Obat Terlarang di Indonesia**

Hasil penelitian BNN tidak mencantumkan secara spesifik penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Namun tetap dapat menjadi acuan dalam mengukur peredaran zat-zat tersebut di Indonesia. Sepanjang tahun 2003, Puslitbang dan Info BNN, menjalin kerja sama

<sup>7</sup> Sunarso, Siswantoro, S.H, Op. cit, hal 2

<sup>8</sup> Moerdiono, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hal 146

<sup>9</sup> Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1983, Jakarta: Pancuran Tujuh, hal 111

dengan instansi Pranata-UI, FISIP-UI, FKM-UI dalam penelitian Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar dan Mahasiswa tahun 2003, dengan beberapa hasil sebagai berikut<sup>10</sup>:

- Responden penyalahguna narkoba dalam 1 tahun terakhir terdeteksi sebesar 3,9% atau 4 dari 100 orang responden adalah penyalahguna narkoba.
- 43,4% responden pernah menggunakan lebih dari 1 jenis narkoba
- Penyalahguna narkoba dalam kelompok responden berusia di atas 25 tahun merupakan persentase kelompok yang paling besar dibandingkan penyalahguna dalam kelompok usia lainnya.

Dari data yang di dapat dari Mabes Polri mengenai data psikotropika di Indonesia tahun 2000-2004 dapat disimpulkan, bahwa:

- Terdapat kenaikan tajam penyalahguna psikotropika, dari tahun 2000-2004. Kenaikan ini terjadi paling banyak 59% tiap tahunnya. Dengan jumlah kasus penyalahguna tertinggi pada tahun 2004 yang lalu, yaitu sebanyak 3.884 kasus.
- Data menunjukkan pengguna terbanyak adalah usia remaja (di dalam data, umur untuk remaja adalah: kurang dari 16 th, 16-19 th, 20-24 th). Dengan jumlah kasus penyalahguna tertinggi pada tahun 2004 lalu, yaitu sebesar 3713 kasus.

Dari kedua hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia tiap tahun makin meningkat dan terjadi

---

<sup>10</sup> Diambil dari bahan seminar BNN berjudul: "Kebijakan dan Strategi BNN dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)" tahun 2004, hal 5-6.



peningkatan tajam pada 1 tahun terakhir. Kasus penyalahgunaan psikotropika pada usia remaja pun paling banyak terjadi. Hal ini sangat ironis, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan atas paparan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang perlu dijawab dalam studi ini, adalah:

1. Bagaimanakah gambaran terjadinya penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
3. Hambatan-hambatan apakah yang dijumpai dalam langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di Jawa Tengah.
4. Bagaimanakah langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui gambaran terjadinya penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.

4. Untuk mengetahui langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini, menggunakan pendekatan empiris, maka hasilnya diharapkan berguna untuk kepentingan sarana sosial dalam mengembangkan teori-teori hukum tentang dimensi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika.
2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penggunaan kebijakan hukum pidana dan dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas peredaran gelap psikotropika secara efektif, guna mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam melaksanakan penegakan hukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika meliputi penyidikan lalu lintas gelap psikotropika termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi yang ditangani oleh Polisi, Departemen Kesehatan, penuntut umum dan penyidikan perkara oleh hakim serta pembinaan atau resosiliasi oleh lembaga pemasyarakatan atau lembaga sosial lainnya. Peraturan perundang-undangan psikotropika melarang terhadap penggunaan

psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi ia dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda<sup>11</sup>.

I.S. Susanto menyatakan kualitas penegakan hukum dipengaruhi antara lain oleh perundang-undangnya, yang pada dasarnya terhadap undang-undang itu perlu dikaji tentang substansinya, yakni seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan atau manfaat lebih besar dari peraturan atau sebaliknya siapa yang akan dirugikan, apakah Undang-undang tersebut cukup adil apakah sanksinya memadahi dan manusiawi, dan sebagainya<sup>12</sup>.

Di sisi lain berbicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan tidak luput dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana juga mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari, antara lain datang dari keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, disamping ia sendiri juga mempunyai persepsi terhadap masalah yang ditanganya.

Penegakan hukum juga tidak lepas dari bekerjanya suatu sistem peradilan pidana dalam konteks tertentu. Demikian pula dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja. Permasalahan tidak hanya terhenti begitu saja ketika para penegak hukum

---

<sup>11</sup> Sunarso, Siswantoro, S.H., Op Cit., 2004, hal 6.

<sup>12</sup> I.S.Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Dalam Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum Undip No.9 Tahun 1992, hal.17.

telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi lebih jauh dari itu, apakah penegakan hukum tersebut sudah menjadi satu-satunya penyelesaian terbaik.

Di sisi lain sebagai bagian dari subsistem sosial para penegak hukum tentu saja bukan merupakan robot hukum semata, tetapi juga yang mempunyai kehendak, yang masing-masing mempunyai persepsi yang tidak selalu sama dalam menyikapi suatu permasalahan. Sehingga sudah barang tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak selalu sama pula, meskipun atas peraturan perundang-undangan yang sama.

Bahkan realitas sosial tidak sedikit pula pengaruhnya dalam mengkonstruksikan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja ini. Apalagi kalau dipahami bahwa tindak pidana anak atau juvenile delinquency<sup>13</sup> bukan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sebuah akibat lanjutan dari realitas sosial.

Bertolak dari uraian diatas, penegakan hukum di kalangan anak-anak ternyata bukan merupakan permasalahan yang sederhana, sehingga hal tersebut sangat menarik untuk diteliti.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, di samping dapat dikenakan pidana penjara dan juga pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya

---

<sup>13</sup> Bahwa secara etimologis Juvenile Delinquency diartikan sebagai kejahatan anak, bandingkan dengan Robert G. Trojanowics dan Merry Morash dalam bukunya Juvenile Delinquency, Concept and Control, Shaw and Mc.Kay, dalam bukunya Juvenile Delinquency Behaviour, dalam Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya, Paulus Hadisuprpto, Penerbit PT.Citra Aditya, Bandung, 1997.

justru semakin meningkat<sup>14</sup>. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi aspek "legal opinion", dinamika system penegakan hukum yang tidak konstan, terutama menyangkut penerapan hukuman yang tidak konsisten, dapat mempengaruhi pandangan hukum (*legal aspect*) maupun pendapat hukum (*legal opinion*), yang tercetus dari pengamatan para ahli hukum. Hasil pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal, tapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menetapkan penerapan hukuman maksimal tersebut<sup>15</sup>.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Secara sosiologis, maka pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

hukum itu. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri<sup>16</sup>.

Menurut I.S Susanto, paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu<sup>17</sup>.

Lebih lanjut I.S. Susanto menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap Undang-undan itu perlu dikaji tentang substansinya, yakni seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik Undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan/manfaat lebih besar dari peraturan at,au sebaliknya yang akan dirugikan, apakah Undang-undang tersebut cukup adil, apakah sanksinya memadai dan manusiawi dan sebagainya<sup>18</sup>.

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar terhadap Undang-Undang, korban/masyarakat dan aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Sementara dimensi korban antara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang apa yang dipandang

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar baru Bandung, Hal. 23-24.

<sup>17</sup> IS. Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Op. cit, hal. 17.

<sup>18</sup> IS. Susanto, Ibid.

sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya<sup>19</sup>.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan dinilai belum memberikan rasa takut dan oleh norma-norma di luar hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala penegakan hukum secara konsekuen. Padahal, penjatuhan sanksi pidana dapatlah dipandang sebagai politik pemerintah dalam melakukan langkah prevensi terhadap kejahatan. Untuk itu, selain menerapkan hukum pidana, pemerintah juga harus mengetahui sebab-sebab kejahatan tersebut. Hal ini telah lama dikemukakan oleh Thomas More bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Ia memberikan contoh, pada zamannya, para pencopet tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana<sup>20</sup>.

Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan sebab-sebabnya dinamakan kriminologi. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Pemahaman mengenai ruang lingkup –khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian— kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakup kriminologi yang

19

IS. Susanto, Ibid.

20

Santoso dan Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 3.

diketengahkan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.

W A. Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, sedangkan menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Kriminologi dengan hukum pidana sangat erat kaitannya, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penology. Disamping itu dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai "*signal wetenschap*". sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi "warga negara yang baik" dari penjahat<sup>21</sup>.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat juga semakin meningkat. Peningkatan taraf hidup masyarakat dengan didukung oleh semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) juga semakin menambah kompleksnya permasalahan.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 47-48.



Upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul tersebut tentu saja juga tidak semakin mudah tetapi justru sebaliknya yakni semakin pelik dan rumit. Keadaan yang demikian juga terjadi dalam dunia kejahatan.

Tindak pidana yang terjadi sekarang, juga mengalami pergeseran dari yang sederhana menjadi, sangat kompleks. Dari kejahatan kecil-kecilan menjadi kejahatan yang terorganisasi modern). Dengan demikian peningkatan kejahatan tidak saja terbatas pada kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Dari data yang ada di pengadilan terjadi peningkatan sidang perkara anak.

Hal yang sama juga terjadi dalam hal penyalahgunaan psikotropika. Penyalahgunaan psikotropika yang memiliki spektrum dampak yang luas, ternyata telah merambah ke dunia remaja.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Sebagai tambahan, kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan<sup>22</sup>.

Philippe Nonet dan Philippe Selznick mengatakan bahwa Ilmu Hukum selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu.<sup>23</sup> Hal ini

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Hengky Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal 8-9.

<sup>23</sup> Philippe Nonet, Philippe Selznick, *Law and society in transition; Toward Responsive Law*, Harper and Row, Colophon Books, New York, 1978, hal. 1.

tidak berarti bahwa teori hukum yang ada tidak mampu menjelaskan terhadap berbagai permasalahan dan realitas sosial, tetapi apabila manusia mau melihat bagaimana hukum itu bekerja, maka ia juga harus memahami bagaimana proses hukum itu terjadi, dimana hukum itu dibuat dalam sebuah masyarakat dan dalam kondisi yang bagaimana hukum tersebut dicetuskan.

Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih relevan dan lebih hidup, ialah dengan melakukan re-integrasi antara hukum, politik dan berbagai teori dalam ilmu sosial lainnya. Dalam tahapan ini, setiap orang harus memperhatikan masalah-masalah hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk memahaminya dengan mengajukan kerangka kerja dengan membandingkan masing-masing penalaran tersebut (penalaran dari bidang hukum dan penalaran dari bidang ilmu sosial yang di-reintegrasikan) untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada.

### **Aliran-Aliran Pemikiran dalam Kriminologi<sup>24</sup>**

Yang dimaksud dengan aliran pemikiran di sini adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.

Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama, dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami/lihat, sehingga juga bagi para ilmuwan cara pandang yang dianutnya

---

<sup>24</sup>

I.S Susanto, *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1995, hal 2-12.

akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi.

Teori adalah bagian dari suatu penjelasan mengenai "sesuatu" Sementara suatu penjelasan dipandang sebagai masuk akal akan dipengaruhi oleh fenomena tertentu yang dipersoalkan di dalam keseluruhan bidang pengetahuan. Adapun keseluruhan bidang pengetahuan tersebut merupakan latar belakang budaya kontemporer yang berupa dunia informasi, hal-hal yang dipercayai (*beliefs*) dan sikap-sikap yang membangun iklim intelektual dari setiap orang pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Di dalam sejarah intelektual, terhadap masalah "penjelasan" ini secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan yang mendasar yakni pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik, yang kedua-duanya merupakan pendekatan yang dikenal masa kuno maupun modern.

Penjelasan demonologik mendasarkan pada adanya kekuasaan lain spirit (roh).. Unsur utama dalam penjelasan spiritistik adalah sifatnya melampaui dunia empirik; dia tidak terikat oleh batasan-batasan keadaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang bersifat terbatas. Oleh karena spirit (roh) itu sendiri tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dimengerti, sehingga ini merupakan cara penjelasan yang paling sempurna bagi semua fenomena yang sulit dimengerti. Dasar penjelasannya sama, baik bagi yang kuno maupun yang modern, yaitu

adanya kekuasaan yang lain. Pada pendekatan naturalistik, penjelasan yang diberikan lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihatnya dari segi obyek dan kejadian-kejadian dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan demonologik menggunakan dasar kekuatan *dunia lain* untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap obyek-obyek dan kejadian-kejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada. Dengan demikian penjelasannya pada apa yang diketahui atau dianggap benar menurut fakta fisik atau empirik dan dunia kebendaan. Pendekatan naturalistik inipun dikenal baik pada yang kuno maupun yang modern.

Secara garis besarnya, pendekatan naturalistik dapat dibedakan tiga bentuk sistem pemikiran atau aliran pemikiran atau dapat juga disebut paradigma, yang digunakan sebagai dasar kerangka pemikiran dan penelitian dalam memberikan penjelasan mengenai fenomena kejahatan. Perbedaan diantara ketiga aliran ini begitu mendasar, sehingga batasan dan istilah kejahatan dan penjahat bagi kriminologi tertentu tergantung dari aliran pemikiran yang dianutnya. Kerangka pemikiran ini sangat berpengaruh pada cara pendekatan atau cara-cara yang ditempuh dalam mempelajari kejahatan dan konsepnya mengenai tugas diemban kriminologi. Adapun ketiga aliran pemikiran ini adalah pemikiran klasik, positive dan kritis.

### 1. Kriminologi Klasik<sup>25</sup>

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa

---

<sup>25</sup>

Ibid.

intelengensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelengensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik seperti dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konsep yang demikian maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Di dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam

hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Dengan demikian mengarahkan pada persoalan penjeraan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat studi empirik dalam mengukur seberapa jauh perbedaan dalam isi undang-undang atau pelaksanaan hukuman mempengaruhi terjadinya kejahatan. Termasuk dalam lingkup ini adalah penologi. Dalam literatur kriminologi, pemikiran klasik (dan neo klasik) maupun positive merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan. Nama yang sangat terkenal yang dihubungkan dengan mashab klasik adalah Cesare Beccaria (1738-1794).

## 2 Kriminologi Positive<sup>26</sup>

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologiknya atau evolusi kultural. Aliran pemikiran positive ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu *determinis biologik* yang menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai

hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologik. Sebaliknya *determinis kultural* menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang melingkupinya. Mereka berpendapat bahwa dunia kultural secara relatif tidak tergantung pada dunia biologik, dalam arti perubahan pada yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan pada yang lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai sesuai dengan bekerjanya ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan-keterbatasan biologik semata. Dengan demikian biologi bukan penghasil kultur, begitu juga penjelasan biologik tidak mendasari fenomena kultural.

Itu adalah pandangan dari pemikiran positivis yang dikenal dalam filsafat, sosiologi, sejarah dan ilmu pengetahuan alam pada umumnya. Positivis menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab-akibat. Dalam kerangka pemikiran yang demikian, maka tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam bekerjanya menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, sebab undang-undang seringkali membedakan perbuatan legal dan ilegal atas dasar batas-batas yang sangat tajam ('teknis') yang tidak ada hubungannya dengan ide sebab-sebab, sehingga cenderung memberikan

berbagai "batasan alamiah" terhadap kejahatan, yang lebih diarahkan pada ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang pidana. Misalnya Mannheim membela pandangan bahwa kriminologi harus mempelajari seluruh perbuatan anti sosial, baik yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan maupun yang tidak. Sementara Sutherland dalam studinya terhadap kejahatan *white-collar* menganggap kejahatan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang pidana maupun perdata, administrasi dan yang lainnya. Sedangkan Schwendingers memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Cesare Lombroso (1835-1909) dapat dipandang sebagai pelopor aliran ini yang memulai studinya dengan mencari sebab-sebab kejahatan yang lebih menekankan pada sifat dasar *pelaku* kejahatan daripada terhadap ciri-ciri perbuatan jahat.

Di samping itu aliran positivis dapat dipandang sebagai yang pertama kali dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi, dan logika dari ilmu pengetahuan alam di dalam mempelajari perbuatan manusia.

Sebagai pelopor mashab postitive, Lombroso lebih dikenal dengan teori biologi kriminal, namun perlu dicatat bahwa itu bukan merupakan dasar dari aliran positive. Dasar yang sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (*multiple factor causation*), yakni faktor-faktor yang alami atau yang dibawa



manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologik dan sebagian karena pengaruh lingkungan.

### 3 Kriminologi Kritis<sup>27</sup>

Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat, muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup.

Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan sebagai demikian oleh "masyarakat". Oleh karenanya kriminologi kritis mempelajari proses-proses di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), di

---

<sup>27</sup>

Ibid.

samping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.

Menurut kriminologi kritis maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Misalnya apabila sebagian besar pelaku kejahatan adalah orang-orang yang miskin, maka bukan kemiskinan yang merupakan "sebab" kejahatan, akan tetapi karena bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang-orang miskin lebih banyak ditunjuk oleh undang-undang sebagai kejahatan dan dalam bekerjanya hukum maka undang-undang macam beginilah lebih banyak dijalankan. Ini berarti bahwa kita tidak dapat memahami kejahatan semata-mata dengan mempelajari penjahat ("resmi"), akan tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan proses kriminalisasi, yakni proses yang mendefinisikan orang dan tindakan tertentu sebagai kejahatan.

Sehubungan dengan itu, maka tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Pendekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan "interaksionis" dan "konflik". Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari "persepsi" makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga mempelajari makna kejahatan yang dimiliki agen kontrol sosial dan orang-orang yang

diberi batasan sebagai penjahat. Di samping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat. Dengan demikian untuk dapat memahami kejahatan, perlu dipelajari seluruh proses kriminalisasi, dalam arti baik proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang yakni dijadikannya perbuatan tertentu sebagai tindak pidana maupun dalam bekerjanya hukum yakni proses-proses yang menjadikan orang (-orang) tertentu sebagai penjahat.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep "penyimpangan" (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari "penyimpangan sosial" dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan "berbeda" dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau "biasa" di masyarakat, dan terhadap "tindakan menyimpang" tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai "berbeda" dan "jahat".

Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang dari masyarakat tertentu tergantung pada masyarakat itu sendiri. Kadangkadang kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan itu tidak begitu jelas, sehingga pada akhirnya banyak sekali tergantung dari sikap polisi, jaksa dan hakim. (Misalnya pada kasus-kasus "perkosaan", khususnya tentang batas-batas "godaan" yang boleh dilakukan pria). Dalam arti luas, kejahatan (penyimpangan) seperti halnya kecantikan, ada di mata yang

memandangnya. Dengan demikian penyimpangan dan reaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang hanya dapat difahami dalam hubungan satu dengan yang lain. Dasar pemikiran interaksionis ini bersumber pada "symbolic interactionism" yang dikemukakan oleh Mead (1863-1931) yang menekankan, bahwa "sumber" perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial akan tetapi juga peranan individu dalam menangani, menafsirkan dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan. Menurutnya manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya. Sebaliknya pendekatan konflik lebih memfokuskan studinya dalam mempertanyakan "kekuasaan" dalam mendefinisikan kejahatan.

Menurut kriminologi konflik<sup>28</sup>, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Bersamaan dengan itu, mereka dapat mencegah dijadikannya tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang lebih kecil kekuasaannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan kebalikan dari kekuasaan: Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang-orang, semakin

kecil kemungkinannya untuk dijadikan sebagai kejahatan, dan begitu sebaliknya. Orientasi sosio-psikologis teori konflik terletak pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep "proses sosial" dari perilaku kolektif.

Pandangan ini<sup>29</sup> mengasumsikan bahwa manusia selalu merupakan makhluk yang "terlibat" dengan kelompoknya, dalam arti hidupnya merupakan bagian dan produk dari kelompok kumpulankumpulannya. Pandangan ini juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kumpulan kelompok-kelompok yang bersama-sama memikul perubahan, namun mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan-kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan. Kontinuitas interaksi kelompok-kelompok ini, serangkaian langkah atau tindakan dan perlawanannya yang berlangsung secara terus menerus, tindak pengawasan yang bersifat timbal balik, merupakan unsur penting dari konsep proses sosial. Pengaruh timbal balik yang berlangsung secara terus menerus di dalam menjaga keseimbangan (stabilitas) yang segera dan dinamis memberi arti penting bagi ciri "perilaku kolektif" -yang berbeda dengan ide perilaku individual yang simultan. Arus yang berubah ubah dari tindakan kolektif ini memberi kesempatan terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran posisi secara terus menerus, dalam arti kemungkinan mendapatkan status atau sebaliknya akan kehilangan. Akibatnya ada kebutuhan untuk menjaga dalam mempertahankan posisinya, di samping

---

<sup>29</sup>

Ibid.

untuk selalu berusaha memperoleh kesempatan dalam memperbaiki status di dalam hubungan dengan kelompok-kelompok yang ada. Dengan demikian, menurut aliran pemikiran ini, konflik dipandang sebagai sesuatu yang penting dan mendasar dari proses sosial di mana kelangsungan sosial bergantung.

Pada tahun 1970-an muncul apa yang disebut sebagai "kriminologi Marxis". Mengenai istilah "Kriminologi Marxis" terdapat beberapa penulis yang menentanginya. Menurut Paul Q. Hirst, tidak ada teori Marxis tentang kejahatan baik dalam eksistensinya, maupun yang dapat dikembangkan dari Marxisme yang ortodoks. Uraian mengenai pandangan Hirst ini dapat dibaca dalam Taylor et. al. (1987). Begitu juga dalam nada yang sama diajukan oleh Denisoff & McQuarie (1975). Di Amerika, Kriminologi Marxis dikembangkan dari teori konflik yang antara lain diajukan oleh Quinney, sementara di Inggris berkembang dari perspektif interaksionis yang antara lain dapat ditemukan pada karya Taylor, Walton & Young (1973 dan 1978).

Tanpa bermaksud untuk memasuki lebih dalam pembicaraan tentang Kriminologi Marxis, namun perlu dicatat bahwa teori konflik tidak sama dengan teori Marxis. Lebih-lebih jika ada anggapan bahwa aliran kritis sama dengan aliran Marxis, perlu dipertanyakan. Teori Kriminologi Marxis hanyalah merupakan salah satu usaha "mengembangkan" teori konflik — yang juga dipertanyakan kebenarannya istilah tersebut sebagaimana disebutkan di atas— di samping terdapat teori konflik yang non Marxis,

yang sangat berbeda. Selain itu juga perlu dicatat bahwa beberapa penulis bahkan mencampurkan antara teori konflik yang Marxis dengan yang non Marxis, seperti Reid dan Allen. Reid misalnya, menyatakan bahwa teori konflik mendasarkan pada 3 hal: (1) bahwa perbedaan bekerjanya hukum mencerminkan kepentingan dari *rulling class* (2) bahwa perbuatan kejahatan akibat dari cara produksi dalam masyarakat, dan (3) bahwa hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dari *rulling class*. Apa yang disebut oleh Reid tersebut adalah tentang Kriminologi Marxis, dan bukan teori konflik yang non Marxis. Misalnya konsep *rulling class* tidak digunakan oleh pendukung teori konflik yang non Marxis seperti Sellin, Vold, Turk.

Secara umum teori konflik yang non Marxis menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak seimbang mendasari terjadinya kriminalisasi atas perilaku tertentu dibandingkan dengan yang lainnya dan tentu saja dapat mengarah pada keinginan untuk mengubah hubungan tersebut Hal ini membawa analisis "obyektif" proses kriminalisasi ke amh usaha yang bersifat politis dalam membantu kelompok yang lemah dalam perjuangannya menghadapi kelompok yang sangat kuat. Satu perbedaan yang mendasar antara kriminologi Marxis dengan yang non Marxis adalah pandangannya apakah kejahatan dianggap bersifat patologis. Pada perspektif konflik yang non Marxis maka kejahatan dipandang sebagai tindakan yang normal dari orang-orang yang normal yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi, dan dalam

perspektif perilaku menyimpang, kejahatan dipandang sebagai perwujudan dari kebutuhan masyarakat untuk mengkriminalisasikan perbedaan. Pendukung kedua perspektif karenanya menolak ide bahwa kejahatan bersifat patologis dengan mengajukan argumentasi bahwa keduanya, yaitu perbuatan dan kriminalisasi terhadap perbuatan adalah normal. Sebaliknya bagi kriminologi Marxis, dia kembali pada ide para positivis yakni bahwa kejahatan bersifat patologis, yang didasarkan pada konsep Marx bahwa orang menjadi "*demoralized*" dan subyek dari segala bentuk kejahatan dan perbuatan yang tidak senonoh apabila di masyarakat mereka ditolak peranannya sebagai "produktif". Perilaku yang patologis tersebut berupa "batasan alamiah" sebagai "perbuatan" yang merugikan masyarakat" atau "tindakan-tindakan yang memperkosa hak-hak asasi manusia", dan dapat meliputi kejahatan-kejahatan lapis bawah, di mana orang-orang miskin merupakan sasarannya di antara mereka sendiri dan juga yang lainnya, maupun kejahatan-kejahatan lapis atas seperti pencemaran, perang dan eksploitasi terhadap kelas pekerja.

Sebab-sebab dari perilaku yang bersangkutan dianalisis dan ditemukan melekat pada sistem ekonomi kapitalistik dan untuk mengobatinya adalah melalui pembangunan masyarakat sosialis. Dengan demikian struktur argumentasinya --batasan alamiah tentang kejahatan, mencari sebab-sebab dan cara pengobatannya-- identik dengan positivisme, akan tetapi sangat berbeda dengan perspektif teori konflik yang non Marxis dan teori interaksionis yang menganalisis proses-proses



kriminalisasi. Bagi kriminologi Marxis maka "tindakan yang merugikan masyarakat", yang "memperkosakan hak-hak asasi manusia" tidak dilihat sebagai normal akan tetapi merupakan produk yang bersifat *patologis* dari sistem ekonomi yang *patologis*.

Di samping itu di negara-negara komunis seperti Uni Sovyet dan Jerman Timur (sebelum berantakan karena pengaruh glosnits dan *perestroika* pada tahun 1980-an) karena dipengaruhi oleh kondisi politik dan ideologi Marxis yang dianut oleh negaranya, maka perkembangan kriminologinya selalu berorientasi pada kepentingan praktis-melalui keputusan-keputusan partai-- dan akan tetap menjadi bagian dari hukum pidana, dalam arti membantu pihak penguasa dalam melaksanakan hukum pidana dan mencari bentuk-bentuk penghukuman dan tindakan yang dipandang efektif. (Bandingkan dengan kriminologi klasik dan positif). Sedangkan studi kriminologi yang mempertanyakan kebijaksanaan dan tindakan penguasa seperti dalam pembuatan undang-undang maupun pelaksanaannya, --dan karenanya juga mempertanyakan proses-proses kriminalisasi-- dianggap *bertentangan* dengan penguasa dan *dilarang*. Ini berarti bahwa di negara-negara komunis tidak dikenal aliran pemikiran kritis maupun teori konflik dalam kriminologi. Akhirnya, perlu dicatat bahwa nilai dari teori konflik yang non Marxis adalah pandangannya bahwasanya di dalam setiap masyarakat-- apakah itu masyarakat kapitalis, komunis, fasis, demokratis atau apa saja-- selalu terdapat konflik nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan di antara bagianbagian di dalam masyarakat,

dan penyelesaian dari pertentangan clan konflik tersebut akan dipengaruhi oleh kekuasaan (*power*) dari kelompok-kelompok yang bertentangan. Sesuai dengan tuntutan masyarakat modern, maka cara-cara penyelesaian konflik ini terutama dilakukan melalui hukum, baik melalui pembuatan perundang-undangan maupun melalui bekerjanya hukum.

### **Kejahatan korporasi<sup>30</sup>**

Istilah kejahatan *white-collar* untuk pertama kali dipakai oleh Sutherland pada tahun 1939 untuk menunjuk pada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang "terhormat" dalam melakukan pekerjaannya sebagai bankir, usahawan, industriawan, dan kelompok profesi. Dalam perkembangannya, istilah ini juga dipakai terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh organisasi dan korporasi dalam mencapai tujuannya. Dari studi Sutherland tersebut terungkap bahwa hukum di dalam bekerjanya bersifat pandang bolo, artinya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang "terhormat" (kejahatan *white collar*) hanya sebagaian kecil saja yang diteraskan ke pengadilan pidana.

Edward Ross<sup>31</sup> dalam suatu artikel di suatu majalah Amerika tahun 1907 menyebut kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh prang-prang "terhormat" ini dengan istilah *criminaloid*. Olehnya digambarkan bahwa *criminaloid* ini menikmati "kekebalan" terhadap dosa-dosanya yang ban u berkat penampilannya yang "terhormat", sehingga teriindung dan celaan masyarakat. Memperoleh perlindungan karena hubungannya dengan

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 82-83.

<sup>31</sup> Ibid.

penegak hokum dan kelompok atau organisasi yang baik dan dengan sifat yang seolah-olah konservatif, dia bahkan berhasil "mengangkangi" masyarakatnya bagaikan seorang raksasa.

Apa yang tersirat dari tulisan Ross tersebut, masih menarik untuk masyarakat kita pada dewasa ini, yaitu tentang:

- (1) masalah mencari label penjahat yang dapat diterapkan kepada pelakunya,
- (2) sikap masyarakat yang mendua terhadap kerugian dan tanggapan social yang sepadan dengan kesalahannya,
- (3) fakta mengenai praktek penegakan hokum dalam memberikan kekebalan penuntutan yang secara luas didasarkan pada sikap masyarakat yang mendua tersebut,
- (4) warta simbolis bahwa beberapa ciri tertentu, khususnya pimpinan korporasi dan korporasi berada di luar jangkauan hukum pidana. Secara umum kejahatan *white-collar* dapat dikelompokkan ke dalam:
  - (a) kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris, pengacara
  - (b) kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan/ penahanan yang melanggar hukum.
  - (c) kejahatan korporasi

Tanpa mengurangi arti bentuk-bentuk kejahatan *white-collar* yang

lainnya, dalam bab ini terutama dibicarakan kejahatan korporasi. Yang dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang berupa tindakarn penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencernaran lingkungan, manipulasi pajak. Secara konsepsual, kejahatan yang menyangkut korporasi perlu dibedakan antara

- (a) kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan,
- (b) korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan), dan
- (c) kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, di sini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

Dengan demikian pengertian kejahatan korporasi terutama menyangkut tindakan-tindakan korporasi yang merugikan masyarakat luas dalam usahanya mencapai tujuan korporasi, yakni mencari keuntungan (yang sebesar-besarnya ).

Cesare Lombrosso (1835-1909) adalah seorang dokter kelahiran Itali yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Hal ini

dikarenakan Lombroso merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah (*rational-scientist thinking and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta meihatnya dari banyak faktor<sup>32</sup>.

Teori "Born Criminal" Lombroso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang Evolusi Manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin Atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (*medical-record*). Antara lain: telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Penelitian ini melahirkan berbagai tulisannya pada masa itu.

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan Penjahat kedalam empat golongan yaitu<sup>33</sup>:

1. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavism tersebut di atas;

<sup>32</sup> I.S Susanto, *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1995, hal 5.

<sup>33</sup> Topo Santoso, Eva A. Zulfa, *Ibid*, hal 24.

2. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; embisiil atau paranoid;
3. *Occasional Criminal* atau Criminaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Disamping teori biologi dari Lombroso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori Psikis, di mana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah nara pidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes berupa pada para serdadu Amerika pada perang dunia I. Mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang yang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ dibawah 100.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun ternyata

hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.

3. Teori Psikopati: berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, penggunaan obat bius.

Disamping teori-teori yang menitikberatkan pada kondisi individu, ada pula golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam empat kelompok besar yaitu:

1. Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi;
2. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal;
3. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan;
4. kelompok teori yang disebut teori kritis atau modern.

Teori-teori dari perspektif Biologis dan psikologis di atas sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Mencari, mencoba mengidentifikasi "macam manusia" mana yang menjadi penjahat dan mana yang bukan. Teori-teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam satu wilayah yang luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual. Sehingga menjadi tidak relevan dalam menganalisis sebab-sebab kejahatan<sup>34</sup>.

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori dengan pendekatan sosiologik pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma disebabkan oleh "kelainan" atau kemunduran" biologik atau psikologik dari pelaku. Teori sosiologik ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain yang tidak melanggar norma. Dengan demikian penekanan teori ini terletak kepada pengetahuan dan pengertian mengenai proses belajar pelanggar muda. Dalam pemikiran ini, tingkah laku melanggar norma dipelajari seseorang dalam jangka waktu panjang dari kebudayaannya dengan bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran norma tersebut. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi

---

<sup>34</sup>

Ibid, hal 26.



tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). Penulis akan menggunakan teori ini dalam penelitian.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam penulisan ini meliputi :

### 1. Pendekatan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, studi penyalahgunaan psikotropika dikalangan remaja di Jawa Tengah, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer<sup>35</sup>.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, sehingga akan melihat 2 (dua) entitas penting yaitu tidak saja memandang hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata tetapi lebih dari itu adalah memandang hukum dalam arti realitas sosial. Oleh sebab itu akan membawa konsekuensi pada penggunaan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini dimaksudkan untuk menggali makna yang tersembunyi dibalik fenomena-fenomena yang muncul dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

---

<sup>35</sup> Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal 52.

Pendekatan sosiologis dilakukan dengan terang pikir pengembang paradigma<sup>36</sup> alamiah (naturalistic paradigm)<sup>37</sup> yang melihat suatu realitas sebagai suatu kenyataan ganda, dibentuk dan merupakan keutuhan, dan inkuirinya terikat nilai, oleh karena itu pula peneliti disyaratkan melakukan studi dengan latar alamiah, bersifat deskriptif dan penafsirannya terikat ruang dan waktu.

Dengan menggunakan paradigma alamiah, latar alamiah menempati posisi yang sangat penting, oleh sebab itu institusi hukum dipahami tidak semata-mata dipandang sebagai entitas normatif yang eksotrik perse, tetapi lebih dipandang sebagai bagian subsistem dari keseluruhan sistem sosial yang tentu saja memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Dengan demikian lembaga penegak hukum dalam penelitian ini dilihat sebagai sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP), dan Sistem peradilan Pidana sendiri berada atau menjadi bagian dari sub-sistem sosial. Terhadap hal ini membawa konsekuensi logis akan pendekatan yang digunakan untuk meneliti masalah ini, yaitu berangkat dari dua pendekatan yaitu,

---

<sup>36</sup> Paradigma ini berawal dari pandangan Max Weber yang selanjutnya diteruskan oleh Irwin Kutcher, dan yang lebih dikenal dengan pandangan "fenomenologis". Paradigma ini mendasari aksiomanya pada "the naturalistic sociological theory" dan "the wualitative phenomenological theory", yang kalau hendak disingkat menurut Lincoln and Guba bertumnu pada 5 (lima) aksioma, Lihat Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 31-32.

<sup>37</sup> Paradigma (penelitian) menurut Bogdan dan Bikten adalah kumpulan longgar dari sejumlah umsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian, baca Lexy J. Moleong, ketika membahas topik "Paradigma Penelitian Kualitatif dalam bukunya Metodologi penelitan Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, bandung, cetakan ke-7, 1996, hall30. Bandingkan juga dengan pengertian paradigma menurut Thomas Khun, yang lebih kurang dipakai sebagai separangkat keyakinan komunitas ilmu dalam berolah ilmu, Deborah A., Redman, *Economic and the Philosophy of Social Science*, New York, Oxford University Press, 1991, hal. 16.

pertama model "interaksionisme untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai bagian dari sub-sistem sosial.

Kedua, model "rationalistik", dalam rangka membangun pemahaman panafsiran, sebagai landasan tinjauan terhadap Undang-undang yang mendasari bekerjanya lembaga penegak hukum khususnya dalam menangani penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, sehingga akan didapat pemahan antara yang tersurat dan tersirat dalam Undang-undang tersebut dengan sesuatu di luarnya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis menganalisis sebab-sebab penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah, frekuensi terjadinya penyalahgunaan Psikotropika di Jawa Tengah dan menganalisis langkah-langkah penanggulangannya di Jateng.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, keduanya saling melengkapi.

Pada prinsipnya terdapat dua kategori data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Data primer tentang para responden, napi, dan mantan napi penyalahguna psikotropika di kalangan remaja yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan pengisian angket Termasuk kuisisioner yang disusun oleh penulis dalam menganalisis data<sup>38</sup>.

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yang merupakan perpaduan

<sup>38</sup> Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta: Bandung, 2004, hal 97

antara wawancara bebas dan terpimpin. Dalam pelaksanaannya, pewawancara hanya membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Sedangkan angket yang digunakan adalah angket tertutup.; 2) Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu hal-hal yang mendasari bekerjanya lembaga penegak hukum seperti norma-norma Pancasila, UUD 1945, perundang-undangan, Ketetapan MPR, dan dokumen lain yang mendukung yang didapat dari sumber-sumber pustaka.

Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini adalah data yang di dapat dari tabel penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah yang di dapat dari *Data dan Informasi Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jateng* dan *Dinas Kesehatan Prop. Jateng*,serta dari Polda Jateng, berkisar tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.

Dengan bertitik tolak dari pendekatan yang digunakan yaitu interaksionisme sirnbolik dan rasionalisme, yang akhirnya akan sampai pada upaya untuk memahami apa adanya dan apa yang seharusnya dilakukan lembaga penegak hukurn dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak, maka akan didapatkan 3 (tiga) sumber. Sumber dimaksud adalah aparat birokrasi penegak hukum, aparat lain yang berkompeten dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Penetapan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sesuai kepentingan dan keperluan analisis. Pengembangarn data

maupun sumbernya dilakukan dengan mengikuti prinsip "*snow balling*" hingga mencapai titik kejenuhan dalam arti sampai kelengkapan dan validitas data dirasa cukup bagi kepentingan analisis.

Sedangkan sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Terhadap data primer, yang menjadi sumbernya adalah para responden penelitian penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja yang berada di kotamadia Semarang. Sedangkan sumber data sekunder yang menjadi rujukan berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen atau risalah-risalah perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dan hasil kegiatan ilmiah lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Bagaimana cara memperoleh data merupakan suatu metode khusus membicarakan teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan angket, serta studi kepustakaan. Wawancara dan angket adalah data primer yang merupakan data kunci dalam penelitian yuridis empiris. Sedangkan, studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan melalui penelitian kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku sebagai acuan, tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi yang sedang penulis teliti yang dapat dipergunakan sebagai kerangka atau landasan teori tertentu maupun

berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis empiris-kualitatif<sup>39</sup>, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>40</sup>. Penelitian yang akan dilakukan termasuk penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya<sup>41</sup>.

Sesuai dengan metode yang digunakan, penelitian ini mengungkapkan atau menggambarkan sebab, frekuensi, dan langkah,serta hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.

## F. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

Setelah Bab I Pendahuluan yang tersusun atas latar belakang, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan; dilanjutkan dengan Bab II Tinjauan Pustaka, yang mengemukakan Pengertian Psikotropika, Pengaruh

<sup>39</sup> Menurut *Miles & Huberman*, dalam analisis kualitatif maka data yang muncul bukan merupakan rangkaian kata-kata. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara, seperti observasi, wawancara, intisari dokumen maupun pita rekaman. Serta biasanya diproses melalui berbagai kegiatan, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan ataupun alih tulis. *Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1992, Cetakan Pertama, hal 15-16.

<sup>40</sup> Lexy J. Moloeng, *ibid*, 1996, hal 3.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 9-10.

Psikotropika bagi Penggunaanya, Pengertian Remaja dan Kondisi Kejiwaan Remaja, Pengertian Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja, Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja, dan Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja. Sajian dilanjutkan dengan Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi mengenai Gambaran Penyalahgunaan Psikotropika di Jawa Tengah, Faktot-faktor Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja Jawa Tengah, Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Psikotropika di Jawa Tengah, dan Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jawa Tengah. Dan kemudian diakhiri dengan Bab IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah bahan atau zat (substansi) yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. WHO (1969) memberikan batasan mengenai "*Drug*" (Obat), setiap zat (bahan) yang jika masuk dalam organisme hidup, akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme. Bahan-bahan tersebut seringkali disalahgunakan (*drug abuse*), sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan (*drug dependence*).

Sementara Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, mendefinisikan Psikotropika sebagai zat atau obat bukan narkotik tetapi berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Melalui pengaruhnya pada susunan saraf pusat, ia dapat menyebabkan efek ketergantungan. Psikotropika dapat digolongkan atas<sup>27</sup>:

1. *Amphetamine* adalah sekelompok zat/obat yang mempunyai khasiat sebagai stimulant susunan syaraf pusat. Amfetamin bersifat menimbulkan

---

<sup>27</sup> Diambil dari BNN "Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda", 2004, Jakarta, hal 19-22.



rangsangan serupa dengan Adrenalin, suatu hormon yang merangsang kegiatan susunan syaraf pusat dan meningkatkan kinerja otak.

2. ATS yaitu (*Amphetamine Type Stimulants*), adalah nama sekelompok zat/obat yang mempunyai khasiat sama dengan atau seperti amphetamine. Nama lain yaitu Speed, Crystal dan Ecstasy.
  - a. Shabu adalah nama jalanan untuk amfetamin.
  - b. Ice adalah bentuk amfetamin baru yang pada akhir-akhir ini memasuki pasaran gelap. Ice dibuat dari bahan dasar methamfetamin dalam bentuk kristal biru yang dapat dihisap dengan hidung.

Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memuat empat golongan psikotropika, yaitu : Psikotropika Golongan I, sebanyak 26 jenis; Psikotropika Golongan II, 14 jenis; Psikotropika Golongan III 9 jenis dan Psikotropika Golongan IV sebanyak 60 jenis<sup>28</sup>.

Daftar psikotropika dapat bertambah panjang lagi. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Penggolongan Psikotropika atas Golongan I, II, III dan IV, ditentukan oleh tingkat ketergantungannya. Pasal 2 ayat (2) ini berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- Ayat (2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
- a. Psikotropika golongan I;
  - b. Psikotropika golongan II;
  - c. Psikotropika golongan III;
  - d. Psikotropika golongan IV;

---

<sup>28</sup> BNN, Op cit.

3. Psikotropika Golongan I yaitu jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk pengobatan seperti antara lain:
  - a. MDMA (Ecstasy).
  - b. Psilosibin dan psilosin , zat yang diperoleh dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico.
  - c LSD (Lysergic Diethylamide).
  - d Mescaline yang diperoleh dari tumbuhan sejenis kaktus; tumbuh di Amerika Barat daya seluruhnya ada 26 jenis
4. Psikotropika Golongan II yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti antara lain :
  - a. Amphetamine.
  - b. Metqualon seluruhnya ada 14 jenis.
5. Psikotropika Golongan III yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan ilmu pengetahuan, seperti antara lain:
  - a. Amobarbital.
  - b. Flunitrazepam.
  - c. Pentobarbital seluruhnya ada 9 jenis.
6. Psikotropika Golongan IV yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat

dan digunakan luas untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, seperti antara lain :

- a. Diazepam.
- b. Barbital.
- c. Klobazam.
- d. Nitrazepam seluruhnya ada 60 jenis.

Kebanyakan zat dalam Psikotropika sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan —mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dll.— maka Psikotropika kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Obat-obat psikotropika yang sering disalahgunakan<sup>29</sup>:

#### 1. *Depressant*

Golongan ini dapat mengurangi atau meredakan sistem syaraf pusat, sehingga para pemakai golongan ini dapat merasa tenang, mengantuk dan tertidur. Contoh golongan *depressant* adalah:

- a. Golongan obat tidur. Golongan obat tidur yang terpenting adalah barbiturat, misalnya: luminal, phenobarbital, nembutal, seconal, mogadan, mandrax (mx), rohypnol, optalidol, dan cosadon.
- b. Golongan obat penenang, misalnya valium.

---

<sup>29</sup> Ramadhani, Ade W., "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah", Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hal 102-104

## 2. *Hallucinogen*

*Hallucinogen* adalah golongan obat-obatan yang bekerja langsung terhadap sistem syaraf pusat dan mempunyai efek yang dapat menyebabkan halusinasi. Halusinasi dapat berupa:

- a. *Nice trip*, yaitu suatu keadaan dimana yang bersangkutan akan mengalami keadaan yang dirasakannya indah, menyenangkan dan bahagia.
- b. *Bad trip*, yaitu yang bersangkutan akan mengalami keadaan yang dirasakannya mengerikan atau menakutkan.

Keadaan *nice trip* ataupun *bad trip* dapat terjadi tergantung pada situasi dan kondisi kejiwaan si penyalahguna. Jika yang bersangkutan pada saat penggunaan dalam keadaan senang dan bangga maka halusinasi yang akan dirasakannya berupa keindahan yang dapat membuat dirinya senang dan bahagia. Sebaliknya, jika pada saat menyalahgunakan dalam keadaan ruwet, bingung, dan sedih maka halusinasi yang muncul adalah halusinasi yang berupa hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan.

## 3. *Stimulant*

*Stimulant* adalah jenis obat-obatan yang daya kerjanya adalah merangsang sistem syaraf pusat. Jenis stimulant yang populer di kalangan masyarakat adalah Cafeine yang terdapat dalam minuman kopi dan teh. Pada mulanya masyarakat menganggap sebagai minuman ringan. Tetapi setelah ditemukan stimulant sintesis, maka mulai terjadi

permasalahan.

*Stimulant*<sup>30</sup> dapat menimbulkan rangsangan, meningkatkan kegiatan dan kemampuan, menghilangkan rasa kantuk dan menghilangkan rasa lelah, sehingga dapat bekerja lebih lama. Adapun *stimulant* yang sering disalahgunakan adalah *amphetamine*, *dexa amphetamine*, *Adextreamphetamine*, *methamphetamine*, *phen-metrazine* dan *ekstasi*.

Ekstasi tergolong *recreational drug*. Disebut demikian karena ekstasi banyak digunakan dalam pesta atau tempat-tempat hiburan, seperti diskotik, bar, dan karaoke. Ekstasi mempunyai efek yang berbeda pada setiap penggunanya. Pada seseorang secara ekstrim dapat merangsang paranoia, yaitu kelainan jiwa yang terutama ditandai dengan berkembangnya hasrat atau kecurigaan yang teratur, merasa dirinya seolah-olah dikejar-kejar atau ditindas. Keadaan tersebut dapat menyebabkan penggunanya mudah tersinggung.

Kematian pada pengguna ekstasi dapat disebabkan karena suhu tubuh tidak terkontrol dan dehidrasi, yaitu berupa kehilangan air dari tubuh atau jaringan. Atau kehilangan air secara abnormal. Efek lainnya karena ekstasi bekerja pada pusat susunan syaraf, maka hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak. Efek yang dapat ditimbulkan oleh ekstasi dapat berupa efek psikologi dan efek fisik. Berikut ini adalah obat-obat psikotropika yang sering disalahgunakan, dengan nama dagangnya<sup>31</sup>:

---

<sup>30</sup> Ramadhani, Op cit, hal 103.

<sup>31</sup> BNN, Op cit,

- (1) Amphetamin sulfas – dengan nama dagang : Amphetamin Injeksi dan Amphetamin tablet.
- (2) Nitrazepam – dengan nama dagang : Pil BK, Sedatin, Dumolid, Somnil.
- (3) Flunitrazepam – dengan nama dagang : Rohypnol.
- (4) Bromazepam – dengan nama dagang : Lexotan.
- (5) Diazepam – dengan nama dagang : Valium, Stesolid, Validex, Valinten.
- (6) Flurazepam – dengan nama dagang : Dalmadorm.
- (7) Metakualon – dengan nama dagang : Mandrax.
- (8) Phenobarbital – dengan nama dagang : Cypron Syrup, Sedanal.

## B. Pengaruh Psikotropika Bagi Penggunaanya

Penggunaan psikotropika secara ilegal, akan mempengaruhi kondisi fisik, psikis, dan sosial penggunaanya. *Amphetamine* sebagai salah satu zat psikotropika, mempunyai pengaruh kepada penggunaanya, meliputi<sup>32</sup>:

1. Dampak fisik penyalahgunaan Amphetamine adalah sebagai berikut :
  - a. Euphoria.
  - b. Meningkatkan rasa percaya diri.
  - c. Rasa penampilan diri lebih baik.
  - d. Meningkatkan daya konsentrasi pikiran.
  - e. Tidak cepat lelah.
  - f. Banyak bicara.
  - g. Hidung tersumbat
  - h. Nafas lebih cepat.
  - i. Tekanan darah naik Jantung berdebaran detakjantung tidak teratur.
  - j. Sakit kepala.
2. Dampak psikis penyalahgunaan Amphetamine adalah sebagai berikut:
  - a. Mengurangi berat badan.
  - b. Menghilangkan rasa kantuk.
  - c. Meningkatkan stamina dan prestasi kekuatan fisik, seperti dalam kasus doping oleh para olah ragawan.
  - d. Mengobati depresi ringan, penyakit Parkinson,
  - e. skizofrenia, buta ayam dan hipotensi.

---

<sup>32</sup> BNN, Op Cit, hal 35.

3. Bila digunakan secara terus-menerus, amphetamine akan menimbulkan dampak sebagai berikut :
  - a. Gejala putus obat (bila penggunaannya dikurangi atau dihentikan).
  - b. Gejala apatis, rasa letih.
  - c. Nyeri seluruh badan.
  - d. Hipersomnia.
  - e. Banyak mimpi.
4. Gejala keracunan amphetamine adalah sebagai berikut:
  - a. Muka merah kemudian pucat
  - b. Demam.
  - c. Mual dan muntah.
  - d. Sesak nafas.
  - e. Mudah tersinggung.

Secara umum, dampak penyalahgunaan psikotropika bila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan Psikotropika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Psikotropika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan Psikotropika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang<sup>33</sup>.

#### (1) Dampak Fisik

Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.

---

<sup>33</sup> BNN, Ibid, hal 22.

- (a) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- (b) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- (c) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- (d) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- (e) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- (f) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- (g) Bagi pengguna Psikotropika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- (h) Penyalahgunaan Psikotropika bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi Psikotropika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

## (2) Dampak Psikis

- (a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- (b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- (c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- (d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- (e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri .

## (3) Dampak Sosial

- (a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- (b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- (c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan



psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dll.

## **C. Pengertian Remaja dan Kondisi Kejiwaan Remaja**

### **1. Pengertian Remaja**

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa puber. Pada masa inilah umumnya dikenal sebagai masa "pancaroba" keadaan remaja penuh energi, serba ingin tahu, belum sepenuhnya memiliki pertimbangan yang matang, mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh, nekat dan berani, emosi tinggi, selalu ingin coba dan tidak mau ketinggalan. Pada masa-masa inilah mereka merupakan kelompok yang paling rawan berkaitan dengan penyalahgunaan psikotropika.

Walaupun banyak pihak yang sepakat bahwa masa remaja adalah masa peralihan, seperti yang telah dikemukakan diatas, definisi dari remaja itu sendiri memerlukan kajian dari berbagai perspektif<sup>34</sup>.

#### **a. Remaja Menurut Hukum**

Konsep tentang "remaja", bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Kecuali itu, konsep "remaja" juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Dengan perkataan lain, masalah

<sup>34</sup> Wirawan Sarwono, Sarlito Psikologi Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,hal 4-15.

remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam 100 tahun terakhir ini.

Tidak mengherankan apabila dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak dikenal istilah "remaja". Hukum di Indonesia sendiri, hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam. Hukum Perdata, misalnya, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.

Di sisi lain, hukum pidana memberi batasan 18 tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu tetapi sudah menikah). Anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya apabila ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun (misalnya: mencuri) belum disebut sebagai kejahatan (kriminal) melainkan hanya disebut sebagai "kenakalan". Sebaliknya, jika usia seseorang sudah di atas 18 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, dapat dikenakan sanksi hukum pidana (dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan).

Beberapa undang-undang lain, juga tidak mengenal istilah remaja. Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1979) misalnya, menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan

kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak (misalnya pendidikan, perlindungan dari orang tua, dan lain-lain).

Undang-undang lalu-lintas menetapkan batas usia 18 tahun untuk SIM-A (Surat Izin Mengemudi kendaraan roda 4 berbobot di bawah 2 ton), 21 tahun untuk SIM-BI ke atas (kendaraan roda 4 di atas 2 ton) dan 16 tahun untuk SIM-C (kendaraan roda 2). Undang-undang ini tidak mengecualikan mereka yang sudah menikah di bawah usia tersebut dan memperlakukan semua yang di bawah usia tersebut sebagai belum cukup umur, atau belum dewasa.

Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan orang tersebut. Baru setelah ia berusia di atas 21 tahun ia boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah di sini bahwa walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun (untuk wanita) atau 19 tahun (untuk laki-laki) sebagai bukan anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum dapat dianggap sebagai dewasa penuh, sehingga masih diperlukan izin orang tua untuk mengawinkan mereka. Karena waktu antara 16/19 tahun sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian-pengertian

"remaja" dalam ilmu-ilmu sosial yang lain.

b. Remaja Ditinjau Dari Sudut Perkembangan Fisik

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait (seperti Biologi dan ilmu faal) remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faal alat-alat kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir dari peran perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis/berjanggut yang mampu menghasilkan beberapa ratus juta set mani (spermatozoa) setiap kali ia berejakulasi (memancarkan air mani), atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sebuah set telur dari indung-telurnya.

Sebagai makhluk yang lambat perkembangannya, masa pematangan fisik ini berjalan lebih kurang 2 tahun dan biasanya dihitung mulai haid yang pertama pada wanita atau sejak seorang laki-laki mengalami mimpi-basahnya (mengeluarkan air mani pada waktu tidur) yang pertama.

c. Batasan Remaja Menurut WHO

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan 3 kriteria yaitu biologik, psikologik, dan sosial ekonomi, sehingga secara

lengkap definisi tersebut berbunyi Remaja adalah suatu masa di mana:

- (1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- (2) Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- (3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang ke arah yang lebih kongkret operasional. Ditinjau dari bidang kegiatan WHO, yaitu kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja, baik pria maupun wanita. WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Dalam pada itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda (*youth*) dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional.

Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 14-24 tahun yang dikemukakan

dalam Sensus Penduduk 1980. Menurut hasil sensus ini, jumlah remaja di Indonesia pada tahun tersebut adalah 147.338.075 jiwa atau 18,5% dari seluruh penduduk Indonesia.

d. Definisi Remaja Untuk Masyarakat Indonesia

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Masalahnya adalah karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat dan tingkatan sosial-ekonomi maupun pendidikan. sehingga, tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara nasional.

Walaupun demikian, sebagai pedoman umum kita dapat menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (1). Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
- (2). Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- (3). Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (*ego identity*, menurut Erik Erikson), tercapainya fase genital dari

perkembangan psikoseksual (menurut Freud) dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (Piaget) maupun moral (Kohlberg) (kriteria psikologik).

Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan sebagainya. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologik, masih dapat digolongkan remaja. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal (terutama pendidikan setinggi-tingginya) untuk mencapai kedewasaan. Tetapi dalam kenyataannya cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia tersebut.

Dalam definisi di atas, status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita secara menyeluruh. Seorang yang sudah menikah, pada usia berapa pun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja di sini dibatasi khusus untuk yang belum menikah.

Dari beberapa definisi mengenai remaja yang telah dikemukakan diatas, penulis mengambil range usia remaja antara 13-21 tahun, sebagai sample dalam analisis.

## **2. Kondisi Kejiwaan Remaja**

Kondisi kejiwaan remaja, Bervariasi mulai dengan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat sampai pada gangguan proses pikir dan emosi yang labil, mudah tersinggung banyak bicara meskipun cadel, semponyongan, gangguan perhatian/ daya ingat, dan berlanjut dengan hilangnya kontrol pada rangsang seksual dan agresifitas, dapat menimbulkan perilaku penyimpangan yang berakibat pada pelanggaran hukum.

Remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang mereka hadapi dan mudah bersatu dengan sesamanya yang kemudian membentuk suatu kelompok-kelompok sebaya. Mereka akan lebih mengedepankan kekompakan, kesetiaan, kepatuhan dan solidaritas yang tinggi terhadap kelompok sebaya, mengalahkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap orang tua dan gurunya<sup>35</sup>. Dari kelompok-kelompok remaja itu akan berakibat pada kenakalan remaja yang mula-mula bersifat ringan, misalnya membolos sekolah sampai pada kejahatan yang sifatnya kriminal seperti kejahatan terhadap benda misalnya mencuri, merampok, menjambret dan sebagainya, timbul onar dan perkelahian pelajar atau perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup> BNN, Op. Cit, hal 32.



Masalah kenakalan remaja yang terjadi di Jawa Tengah dinilai oleh banyak kalangan sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Hal ini tentu saja bukan hanya membuat kekhawatiran orang tua tetapi juga meresahkan masyarakat. Dan yang paling memprihatinkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah siswa.

Dalam menghadapi remaja ada beberapa yang harus selalu diingat, yaitu bahwa jiwa remaja adalah jiwa yang penuh gejolak (*Strum Und Drang*) dan bahwa lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat (khususnya di kota-kota besar dan daerah-daerah yang sudah terjangkau sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan) yang mengakibatkan kesimpangsiuran norma (keadaan anomie) kondisi intern dan ekstern yang sama-sama bergejolak inilah yang menyebabkan masa remaja memang lebih rawan daripada tahap-tahap lain dalam perkembangan jiwa manusia.<sup>36</sup>

#### **D. Pengertian Penyalahgunaan Psikotropika di kalangan Remaja**

Zat-zat dalam psikotropika seharusnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan - mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dll, maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut: 1) coba-coba; 2) senang-senang; 3) menggunakan pada saat atau keadaan tertentu; 4)

---

<sup>36</sup> Sarwono, Sarlito Wirawan, Op cit, hal 227

penyalahgunaan; 5) ketergantungan. Jadi dapat dikatakan penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter.

Penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja/ pelajar merupakan masalah yang kompleks, karena tidak saja menyangkut pada remaja atau pelajar itu sendiri, tetapi juga melibatkan banyak pihak baik keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, teman sebaya, tenaga kesehatan, serta aparat hukum, baik sebagai faktor penyebab, pencetus ataupun yang menanggulangi.

Penyalahgunaan psikotropika oleh remaja adalah bentuk dari kenakalan remaja yang akan menjurus pada kejahatan;<sup>37</sup> dibawah pengaruh psikotropika, remaja akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah.<sup>38</sup> Timbulnya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak-anak yang merupakan "*a generation who will one day become our national leader*" perlu mendapat pengawasan dan bimbingan kita semua, agar tidak terjerumus kedalam kenakalan yang bersifat serius.

Epoch Markum dalam makalahnya yang berjudul " Kerentanan psikologis remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dan upaya

---

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, hal 7

<sup>38</sup> Sitanggang, *Sadar Sebelum Terlambat*, Jakarta, 1981, hal 80

penanggulangannya"<sup>39</sup> mengemukakan bahwa: Penyalahgunaan narkoba dilakukan sebagian besar oleh kaum muda (remaja dan pemuda), karena pada satu sisi masa remaja adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa, penuh badai dan ketegangan, merupakan masa yang penuh tantangan dan paling sulit, sementara pada sisi lainnya dihadapkan pada situasi lingkungan sosial kota besar yang permisif, anomie (hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya), dan mengkhawatirkan.

Masa remaja ditandai oleh: perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual, dan sosial. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak, sebagai berikut; pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuanya. Selain predisposisi remaja, pola asuh orang tua turut membentuk perilaku remaja: Pola asuh permisif (serba boleh), dengan kendali orang tua rendah, sikap demokratis tinggi, tuntutan berprestasi rendah dan kasih sayang orang tua tinggi. Pola asuh otoriter: kendali orang tua tinggi, sikap demokratis rendah, tuntutan berprestasi tinggi, dan kasih sayang orang tua rendah. Pola asuh otoritatif: kendali orang tua yang tinggi, sikap demokratis tinggi, tuntutan berprestasi tinggi, dan kasih sayang orang tua tinggi.

Ada tujuh predisposisi pengguna narkoba, yaitu sebagai berikut<sup>40</sup>:

---

<sup>39</sup> BNN, "*Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*", Jakarta: BNN, 2004, hal 23.

<sup>40</sup> BNN, Ibid.

1. Sensitif terhadap perasaan menyenangkan.
2. Tidak mampu mengendalikan perilaku, impuls sesaat lebih dominan.
3. Tidak punya pengetahuan tentang cara mengendalikan dan mengatasi masalah.
4. *Impulsive*, punya pola otomatis dan nonreflektif.
5. Cepat bosan, toleransi rendah terhadap rutinitas.
6. Toleransi rendah terhadap frustrasi.
7. Tidak mampu melihat masa depan, dan lebih berorientasi kekinian.

## **E. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja**

### **1. Teori Kriminologi Tentang Sebab Kejahatan**

Penulis menggunakan perspektif sosiologi dalam memaparkan sebab kejahatan. Teori-teori sosiologi mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial).

Perspektif *strain* dan penyimpangan budaya, terbentuk antara 1925 dan 1940 dan masih populer hingga hari ini, memberi landasan bagi teori-teori sub-cultural. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda: teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-teori kontrol

sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif<sup>41</sup>.

a. Teori Strain, *Anomie: Emile Durkheim*<sup>42</sup>

Pada masa di mana dunia ilmu pengetahuan tengah mencari abnormalitas si penjahat, Durkheim justru menulis tentang normalnya kejahatan di masyarakat. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi *anomie*.

b. Teori *Cultural Deviance, Differential Association*: Sutherland

Teori Asosiasi diferensial, memberikan sebab-sebab kejahatan, meliputi, menjadi anggota gang, asosiasi pola perilaku kriminal dan seterusnya; frustrasi karena perbedaan perlakuan atau kepahitan di masa lampau (seperti misalnya yang terdapat pada bekas narapidana);

<sup>41</sup> Santoso dan Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

<sup>42</sup> Ibid, hal 59.

tekanan-tekanan karena takut, adanya ancaman-ancaman, kemiskinan dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Sutherland memperkenalkan *differential association theory* dalam buku teksnya *Principles of Criminology* pada tahun 1939. Sejak saat itu para sarjana telah membaca, menguji, melakukan pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini, yang diklaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku criminal. Differential association didasarkan pada sembilan dalil, yaitu<sup>44</sup>:

- (1) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari).
- (2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.
- (3) *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak daripada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.
- (4) *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very, complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri toko,

<sup>43</sup> Noach, Simandjuntak, Pasaribu, *Kriminologi*, Bandung : Tarsito, 1984, hal 347.

<sup>44</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 75-77.

membongkar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan dan memperoleh pengalaman.

- (5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain dia dikelilingi oleh orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.
- (6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum, daripada definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi mempelajari tingkah kriminal tergantung pada berapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.
- (7) *Differential associations may vary in frequency, duration priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti asosiasi/definisi kepada si individu.
- (8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan

pengamatan dan peniruan.

- (9) *While criminal behavior is an expression of general needs of values, it is not explained by those general needs and value, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). Pencuri toko mencuri untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Orang-orang lain bekerja untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Motif-motif frustrasi, nafsu untuk mengumpulkan harta serta status sosial, konsep diri yang rendah, semacamnya-menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dari sembilan

“preposisi” yang dikemukakan oleh Sutherland, yaitu sebagai berikut :

1. Teori differential association (perbedaan pergaulan) tidak perlu menunjukkan dengan siapa bergaul; fokus tersebut tergantung dari pengertian (maksud) yang memberi arti pergaulan tersebut.
2. Secara implisit batasan pengertian differential association bahwa orang yang berada dalam hal kepentingan mereka menggabungkan diri untuk menjunjung tinggi hukum atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Seseorang kemudian akan belajar atau menjauhi dari kejahatan sesuai standart budaya masyarakatnya, khususnya dengan siapa dia banyak bergaul dan lamanya pergaulan tersebut.<sup>29</sup>

#### c. Teori *Social Control*

Teori-teori kontrol sosial, tertarik pada pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini menerima bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan juga bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru, mengapa orang

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Eresco, 1992, hal



menaati norma di tengah banyaknya cobaan, bujukan dan tekanan melakukan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang<sup>45</sup>.

Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bond*. Hirschi sependapat dengan Durkheim, dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur, yaitu sebagai berikut: *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*. *Attachment*, diartikan sebagai keterikatan

---

<sup>45</sup> Ibid, hal 87.

seseorang pada orang lain (orangtua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Involvement*, berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. *Commitment*, diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk: pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta. *Belief*, merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi seorang individu dengan lingkungannya.

## 2. Teori Kriminologi Tentang Sebab Kenakalan Remaja

Teori yang membahas mengenai kenakalan remaja pernah dikemukakan oleh A. K. Cohen dalam bukunya *Delinquent Boys* (1955) dengan menggunakan teori sub budaya delinkuen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya<sup>46</sup>.

Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi,

---

<sup>46</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1995, hal 66

tanggung jawab pribadi, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik dan sebagainya. Dengan terjadinya pergaulan antara dua kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik dan "kebingungan" dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan diantara anak-anak kelas pekerja.

Beberapa tahun kemudian R.A. Cloward dan L.E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency, Opportunity, A Theory of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D. McKay dan E.H. Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama "*differential opportunity sistem*" yang membahas delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat di antara anak laki-laki kelas bawah di daerah pusat kota-kota besar. Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu<sup>47</sup>:

- (1) *criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang,
  - (2) *conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan dan
  - (3) *retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serfs melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.
- Ketiga pola sub kultur delinkuen tersebut menunjukkan adanya

perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya dan juga karena adanya

---

<sup>47</sup> Ibid.

masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Mereka timbul dari proses-proses dan bagian-bagian yang berbeda dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan (*beliefs*), nilai-nilai dan aturan-aturan tingkah laku bagi anggota-anggotanya. akan tetapi ketiganya adalah serupa dalam hal norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah laku anggotanya melarikan diri dari norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas. Dalam teorinya tersebut Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya<sup>48</sup>.

Graham Blaine<sup>49</sup> mengemukakan bahwa biasanya sang remaja mempergunakan obat terlarang dengan beberapa sebab, yaitu:

- (1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
- (2) Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial.
- (3) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- (4) Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- (5) Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
- (6) Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
- (7) Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepatan hidup.

---

<sup>48</sup> Ibid, hal 66-67.

<sup>49</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004, hal 67.

- (8) Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- (9) Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.

Penyalahgunaan psikotropika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan psikotropika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan psikotropika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subyek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara obyektif penyalahgunaan psikotropika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Terjadinya kenakalan remaja tidak terlepas dari ikatan keluarga. Keluarga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap remaja sebagai anggota keluarganya. Keluarga pulalah yang seharusnya dapat membentuk kepribadian yang mantap, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya, dan juga merupakan cermin bagi remaja dalam melakukan sesuatu pada kehidupannya. Mungkin tidak pernah ada

orang tua yang menghendaki anaknya menjadi anak yang nakal, sering merugikan keluarga maupun orang lain. Orang tua selalu mengharapkan agar anak-anaknya kelak menjadi anak yang berguna. Untuk itu orang tua berusaha membekali anak-anaknya dengan pendidikan tinggi. Konsekuensinya adalah anak-anak mereka akan terlibat dalam lingkungan yang baru, yang sama sekali belum mereka kenal, sehingga mereka harus bisa beradaptasi untuk bisa *survive*.

Pergaulan sering ditunjuk sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari. Untuk beberapa kejadian memang benar, akan tetapi tentunya tidak benar untuk semua kasus. Dalam pemikiran ini, tingkah laku melanggar norma dipelajari seseorang (dalam jangka waktu panjang) dari kebudayaan-kebudayaannya dengan bentuk-bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran norma.<sup>50</sup> Banyak sekali jalan yang menghubungkan remaja dengan narkoba, salah satu jalannya adalah kehidupan malam. Pergaulan di kota-kota besar, misalnya, akan menghantarkan mereka kepada minuman keras, kemudian kepada narkoba, sebagai pecandu aktif.

Penyalahgunaan psikotropika dan akibat serta bahayanya yang mengerikan harus mendapat perhatian yang seksama oleh setiap keluarga, dan penanggulangan tiap keluarga tidak saja dalam bidang represif dan kuratif (pemeriksaan, penyembuhan oleh Dokter dan pengawasan

---

<sup>50</sup> I.S Susanto, Op cit, hal 60.

selanjutnya). Lebih-lebih lagi usaha-usaha preventifnya untuk menjaga agar bahaya psikotropika tidak melanda dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan. Usaha-usaha preventif dapat berupa pengawasan yang ketat tetapi bijaksana terhadap kalangan remaja terutama dalam pergaulan yang bebas di kalangan muda-mudi.

Hal ini sesuai dengan *perspektif* teori kontrol sosial yang bertalian dengan mengontrol perilaku manusia yang didasarkan atas penjelasan genetika "*Neurochemistry*", Sosiobiologi, Personalitas, dan pola lingkungan.<sup>51</sup> Tidaklah mengherankan kalau teori kontrol sosial menjelaskan permasalahan kejahatan dan kenakalan pada variabel-variabel sosiologis, seperti struktur keluarga, edukasi atau pendidikan, dan "*peergroups*". Mengapa sampai seseorang menjadi jahat tidak dipersoalkan, melainkan yang justru dipertanyakan ialah: mengapa seseorang mematuhi suatu peraturan. Dengan demikian optik teori ini dapat disebut sebagai teori sosialisasi. Jika dirumuskan dengan cara lain, maka kontrol dilakukan melalui proses sosialisasi. Jadi yang diutamakan adalah kualitas dari proses itu. Versi modernnya merupakan perkembangan alternatif dari "*strain theories*" sebagaimana dikembangkan oleh Reis, Reckless, Sykes, Matza, dan lain-lain.

Untuk menanggulangi benturan antar gejolak itu dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara lebih optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang sestabil

---

<sup>51</sup> Sahetapy, J.E., *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 65

mungkin, khususnya lingkungan keluarga. Keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami-istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja yang melewati transisinya dengan mulus daripada jika hubungan suami-istri terganggu. Kondisi dirumah tangga dengan adanya orang tua dan saudara-saudara akan lebih menjamin kesejahteraan jiwa remaja dari pada asrama atau lembaga pemasyarakatan anak. Bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

#### **F. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja**

Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan tiga elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Namun, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yakni (1) lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat represif dan kuratif; dan (2) lewat jalur non penal (non hukum pidana) preventif dan preemptif, yaitu sasaran pokok adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Sebelum memaparkan pidana penal dan non penal, penulis akan memaparkan politik kriminal Indonesia.



## 1. Politik Kriminal

Berdasarkan fenomena penyalahgunaan psikotropika yang merebak dikalangan remaja, pemerintah membuat suatu kebijakan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain dengan menjalankan politik hukum. Sudarto, pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu<sup>52</sup>:

- a. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. *dalam arti paling luas* (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Menurut Teuku Mohammad Radhie, sebagaimana dikutip oleh Siti Soetami,<sup>53</sup> Politik hukum adalah sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan. Sedangkan menurut Sudarto Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 1.

<sup>53</sup> Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Erisco, 1995, hal 3

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Apa yang dimaksud kebijakan dari negara adalah kebijakan yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas maka pembentuk hukum dan perencana undang-undang dalam mempersiapkan peraturan hukum pidana harus berorientasi pada kepentingan masyarakat di masa mendatang dengan mengingat nilai-nilai sosial budaya dan struktural masyarakat.<sup>55</sup> suatu perumusan hukum pidana yang kurang baik akan berdampak pada kedua tahap berikutnya, sehingga tahap kebijakan formulatif atau legislatif merupakan tahapan yang paling penting.

Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya non penal. Dalam kerangka penanggulangan kejahatan ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa hakekat dan tujuan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan (*Social defence policy*), yang pada akhirnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).

Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Penyusunan suatu perundang-

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal 20

<sup>55</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hal 26.

undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut:<sup>56</sup> :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan *perbuatan yang dikehendaki*, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Hal lain yang perlu diperhatikan apabila suatu perundang-undangan menetapkan ketentuan pidana adalah jenis sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelanggar ketentuan tersebut. Suatu penentuan jenis sanksi haruslah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari bermacam-macam sanksi pidana.

Menurut Bassiouni bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial itu menurut Bassiouni ialah<sup>57</sup> :

- (1) pemeliharaan tertib masyarakat
- (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

<sup>56</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 1981, hal 44 - 48

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, 1996, hal. 39-40.

- (3) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4) memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Arah kebijakan tersebut oleh bangsa Indonesia dituangkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), diantaranya adalah arah kebijakan pendidikan serta sosial dan budaya. Penentuan arah kebijakan tersebut oleh pemerintah tentunya disertai juga dengan pemberian perlindungan, subsidi dan fasilitas.

Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Pengadilan secara khusus ini, misalnya saja, dilakukan dengan memberikan pidana paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana

penjara bagi orang dewasa, sesuai dengan pasal 26 angka 1 UU No. 3 th 1997. lebih lanjut, pasal 26 ini juga menyatakan bahwa anak nakal paling lama dikenai hukum pidana 10 tahun, itupun dilakukan bila anak tersebut seharusnya dikenai pidana mati atau seumur hidup. Hal ini merupakan implikasi bahwa begitu pentingnya arti anak bagi kelangsungan generasi bangsa, pemerintah memberikan keringanan pidana bagi mereka, sehingga mereka masih dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaikinya di kemudian hari.

## 2. Penggunaan Sarana Penal

Menurut Sudarto, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya<sup>58</sup>. Lebih jauh lagi Barda menjelaskan bahwa sanksi hukum pidana bukan merupakan obat untuk mengatasi gejala/akibat dari kejahatan tersebut (pengobatan simptomatik) dan pembedaan hanya bersifat/berfungsi individual/*persons* dan bukan struktural/fungsional.<sup>59</sup>

Walaupun demikian hukum pidana sebagai salah satu sub sistem hukum tetap diperlukan untuk menanggulangi kejahatan (penyalahgunaan psikotropika) yang terjadi di tengah masyarakat khususnya remaja di Jawa Tengah. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan tersebut berkaitan erat dengan masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, Op cit., 2000, hal 41-44

<sup>59</sup> Barda, Ibid, hal. 45

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, ia tidak mempunyai arti sama sekali terhadap perbaikan terpidana, namun begitu reaksi terhadap pelanggaran norma yang terjadi tetap diperlukan. Reaksi dalam bentuk upaya lainnya dapat diberikan oleh hukum pidana sesuai dengan tujuan dan fungsinya, yaitu dengan pidana atau tindakan. Tindak Pidana yang berlaku di Indonesia dalam menangani penyalahgunaan Psikotropika diatur dalam Undang-undang RI No.5 tahun 1997, tentang Psikotropika. Tindak Pidana yang dikenakan adalah sebagai berikut:

(1) Pengguna

Dikenakan Pasal 59, pidana penjara minimal 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Pemilik

Dikenakan Pasal 59 dan 60, pidana penjara minimal 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), paling banyak Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Pengedar

(a) Dikenakan Pasal 59, pidana penjara minimal 4 tahun paling lama 15 tahun. Dan denda Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

(b) Menurut Pasal 60 ayat (3), pengedar yang melakukan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,-

(4) Produsen

Dikenakan Pasal 60 ayat (1), pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan denda Maksimal Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah).

### 3. Penggunaan Sarana Non Penal

Tindakan non penal dalam usaha penanganan penyalahgunaan psikotropika dapat dilakukan oleh semua pihak, bahkan dari lingkungan terkecil, keluarga, kemudian lembaga-lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga sosial masyarakat (LSM). Upaya Polri dalam mencegah dan memberantas penyakit masyarakat, termasuk kenakalan remaja, pada prinsipnya meliputi dua kegiatan, terdiri dari :

a. Pre-emptif

Suatu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, kegiatan yang dilakukan pada dasarnya adalah pembinaan/bimbingan masyarakat dan pendekatan-pendekatan sosial kultural spritual terhadap masyarakat, seperti :

(1) Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK), tatap muka dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar dan mahasiswa serta LSM, sarasehan, dialog interaktif.

(2) Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdar Kamtibmas).

(3) Penyuluhan langsung atau ceramah dan penyuluhan tidak langsung melalui media massa, penyerahan brosur, leaflet, pemasangan billboard atau spanduk yang berisi pesan-pesan kamtibmas.

(4) Polisi Sahabat Anak

b. Preventif

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah masyarakat melalui kegiatan pengaturan/ penjagaan/ pengawalan/ patroli (turjawali), penempatan Polisi dimana-mana (di jalan-jalan pada jam-jam macet/rawan), pengendalian dan pengawasan tempat-tempat rawan atau jalur-jalur peredaran gelap narkoba, melakukan kegiatan operasi kepolisian dan operasi terpadu serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah dan masyarakat peduli Kamtibmas.



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jawa Tengah**

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dengan berbagai bentuk dan dampak yang ditimbulkan merupakan suatu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia (*International phenomenon*), termasuk Indonesia. Fenomena ini dinilai sebagai salah satu masalah nasional yang mengakibatkan kompleksitas persoalan, dan dapat mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara, serta dapat berpengaruh kepada proses pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini.

Kejahatan penyalahgunaan Psikotropika sangat meresahkan masyarakat, karena dampak negatif yang ditimbulkan, merugikan pelbagai pihak, mendatangkan korban dan menghambat cita-cita bangsa dan negara, merusak generasi muda. Juga merupakan suatu beban pekerjaan yang sangat berat bagi aparat penegak hukum.

Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai *crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh orang-orang terpandang di dalam masyarakat. Kejahatan penyalahgunaan Psikotropika dapat pula disebut sebagai "*organized crime*" dan merupakan "*follow up crimes*" dari

kejahatan perdagangan gelap obat bius atau obat-obatan yang merupakan "*core crime*". Oleh sebab itu perlu adanya antisipasi secara optimal dan serius terhadap kejahatan penyalahgunaan Psikotropika. Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah mengeluarkan, menetapkan dan memberlakukan beberapa kebijakan-kebijakan hukum pidana guna pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia yang semakin lama semakin cepat perkembangannya.

Psikotropika dapat diartikan semua zat yang dapat mempengaruhi mental. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika digolongkan menjadi empat golongan yaitu psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV.

Psikotropika yang banyak disalahgunakan adalah jenis *benzodiazepin* dan *amphetamine*. Jenis *benzodiazepin* yang oleh masyarakat disebut sebagai pil koplo yang mempunyai efek penenang (*sedatif*) atau menekan (*psikodepresansia*), jenis pil koplo yang banyak digunakan adalah nipam (*nitrazepam*) dengan nama dagang *rivotril*, *sedulin*, *magadon*, *rohipnol* dan lain-lain.

Jenis *amphetamine* yang banyak tersedia adalah *benzedrin*, *deksedrin*, *metamfitamen*, *metilfenidat*, *extacy*, *inex*, *shabu-shabu* dan lain-lain. Jenis zat ini berefek memacu (*stimulant*) serta menghilangkan rasa lelah, sehingga apabila dalam dosis yang banyak dapat menimbulkan gejala psikotik berupa khayalan (*hallusinasi*). Jenis ini sangat banyak digunakan

oleh remaja dan biasanya di tempat-tempat hiburan. Jenis yang biasa disalahgunakan adalah ecstasy, inek dan shabu-shabu.

Setelah dikemukakan gambaran sekilas tentang Psikotropika dan penyalahgunaannya secara umum, maka pada sajian berikut dikemukakan gambaran penyalahgunaan Psikotropika di Jawa Tengah.

Lima tahun terakhir ini, trend penyalahgunaan Psikotropika di Jawa Tengah mengalami kenaikan tajam. Tercatat dari tabel berikut ini, penyalahgunaan psikotropika dari tahun 2000 hingga 2004 mengalami kenaikan sebesar 304%.

Berdasarkan tabel 3.2 dibawah, penyalahguna usia remaja ini cenderung stabil setiap tahunnya, namun dalam kurun waktu lima tahun terjadi kenaikan secara drastis. Tahun 2000 dan 2001 terdapat 24 kasus, kemudian melonjak pada tahun 2002 dengan jumlah kasus 60 atau kenaikan sebesar 150% dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Angka ini terus meningkat pada tahun 2003 dengan 84 kasus atau kenaikan 40% dibanding tahun 2002, sedangkan pada tahun 2004 angka ini mengalami penurunan sebanyak 1,2% dibandingkan tahun 2003. Jadi, selama lima tahun terakhir, penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah mengalami kenaikan sebanyak 246%.

Sesuai dengan tabel di bawah, dapat dipastikan kelompok usia tahun > 21 Tahun lah yang menempati urutan pertama dalam kasus ini, kecuali pada tahun 2002 kelompok remaja menempati urutan pertama. Pada

umumnya, jumlah kasus pada remaja masih lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok > 21 Tahun.

Tabel 3.1 Klasifikasi Umur di Kalangan Pelaku Penyalahguna Psikotropika di Jajaran Polda Jawa Tengah Tahun 2000-2004

Umur	Th 2000		Th 2001		Th 2002		Th 2003		Th 2004	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
≤ 15 Tahun	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
16 - 19 Tahun	3	3	2	4	12	7	13	5	11	3
20 - 21 Tahun	21	20	27	14	46	25	71	25	72	20
> 21 Tahun	80	77	72	82	124	67	202	70	281	77
Total	104	100	132	100	184	100	286	100	364	100

Sumber: Hasil Anev Penanganan Kasus Narkoba Sejawaran Polda Jawa Tengah Th. 2000-2004.

Berdasarkan tabel 3.3 dibawah, dapat diketahui keterlibatan pelajar dan mahasiswa, Polri dan TNI dalam penyalahgunaan Psikotropika di Jawa Tengah. Penulis menggaris bawahi eksistensi mereka karena sebagai pelajar dan mahasiswa, adalah sangat disayangkan apabila mereka merusak masa depan mereka sendiri dengan menyalahgunakan psikotropika. Sedangkan bagi oknum Polri dan TNI, seharusnya di tangan mereka psikotropika bisa dimusnahkan, tetapi sungguh sangat ironis mengetahui kenyataan yang berbeda. Angka yang didapat pada klasifikasi pelajar dan mahasiswa ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Tahun 2001 mengalami kenaikan sebanyak 9 kasus atau 200% dibandingkan tahun 2000, sedangkan tahun 2002 mengalami kenaikan pesat sebanyak 51 kasus atau 491%. Tahun 2003 mengalami penurunan sebanyak 2% dibandingkan tahun 2002, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2004 sebanyak 36% dibanding tahun 2003.

Tabel 3.2 Status Pekerjaan Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Jajaran  
Polda Jawa Tengah Tahun 2000-2004

Status Pekerjaan	2000		2001		2002		2003		2004	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
TNI	-	-	-	-	1	0,5	-	-	-	-
POLRI	-	-	-	-	-	-	1	0,3	-	-
Swasta	42	41	36	28	41	22,5	88	30,7	140	39
Wiraswasta	3	2	8	6	13	7	64	22	93	25
Tani	4	3	8	6	10	5	13	5	27	7
Mahasiswa	10	10	21	16	14	8	34	12	20	5
Pelajar	11	11	9	8	37	20	16	6	12	3
Buruh	14	13	40	29	53	29	36	12	59	17
Pengangguran	20	20	10	7	15	8	34	12	13	4
Jumlah	104	100	132	100	184	100	286	100	364	100

Sumber: Hasil Anev Penanganan Kasus Narkoba Sejajaran Polda Jawa Tengah  
Th. 2000-2004.

Didapatkan dari data pula, bahwa kasus Psikotropika terjadi lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Jumlah penyalahguna psikotropika, baik laki-laki maupun perempuan, semakin meningkat dari tahun ke tahun dan setahun terakhir mengalami jumlah penyalahguna terbanyak.

Hal ini membuktikan bahwa anak perempuan lebih kecil kemungkinannya bertindak yang diluar aturan. Menurut penulis, salah satu sebabnya adalah karena kebanyakan rakyat Indonesia menganut budaya patriarkal, anak perempuan lebih pantas berada di rumah karena orangtua takut terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, sedangkan anak laki-laki akan terlihat lemah bila selalu berada dirumah. Karena secara fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, banyak orangtua yang menganggap

anak laki-laki lebih bisa menjaga diri dan dibiarkan berkeliaran. Pandangan yang demikian itu yang membuat pengawasan anak laki-laki lebih longgar daripada anak perempuan.

Kasus Penyalahgunaan Psikotropika di Jawa Tengah ini lebih banyak dilakukan pada tataran konsumsi daripada distribusi. Namun begitu, penyalahgunaan ini tidak dapat disepelekan mengingat angka yang ada di lapangan sungguh mengejutkan. Baik distribusi maupun konsumsi, keduanya mengalami peningkatan tajam dan dari tahun ke tahun angkanya semakin bertambah. Situasi moneter negara yang tidak menentu menyebabkan banyak orang mengambil jalan pintas dengan menjalankan bisnis perdagangan gelap Psikotropika, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka distribusi tiap tahunnya. Fakta ini ditunjukkan pada tabel 3.4 dibawah.

Tabel 3.3 Klasifikasi Kejahatan Kasus-Kasus Psikotropika Jajaran  
Polda Jawa Tengah Tahun 2000-2004

Golongan Kejahatan	TH. 2000		TH. 2001		TH. 2002		TH. 2003		TH. 2004	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Kultivasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribusi	34	33	42	32	58	32	45	16	112	30
Konsumsi	70	67	90	68	126	68	241	84	252	70
Total	104	100	132	100	184	100	286	100	364	100

Sumber: Hasil Anev Penanganan Kasus Narkoba Sejawaran Polda Jawa Tengah  
Th. 2000-2004.

Perkembangan tahun 2000-2004 menunjukkan bahwa kasus-kasus Psikotropika Jajaran Polda Jateng cukup bervariasi ditinjau dari jenis Psikotropika. Hal ini tampak dari berbagai barang bukti yang disita yang

berhasil ditemukan di Jajaran Polda Jateng. Untuk itu, dibawah ini dikemukakan tabel tentang Barang Bukti (BB) kasus-kasus Psikotropika di Jajaran Polda Jateng.

Tabel 3.4 Berbagai BB yang diungkap Kasus-Kasus Psikotropika di Jajaran Polda Jawa Tengah Tahun 2000-2004

TH. 2000	TH. 2001	TH. 2002	TH. 2003	TH. 2004
738,5 btr Ecstasy	1234,75 btr Ecstasy	1725,5 btr Ecstasy	880,5 btr Ecstasy	356 btr Ecstasy
915 gr Sabu-sabu	662,6 gr Sabu-sabu	62 gr Sabu- sabtu	537,4 gr Sabu-sabu	372,403 gr Sabu-sabu
77 bks Sabu-sabu	73 bks Sabu-sabu	54 bks Sabu-sabu	34 bks Sabu-sabu	152 pkt/bks Sabu-sabu
360 btr OK Daft. "G"	1145 btr OK Daft. "G"	7948 btr OK daft. "G"	7322 OK Daft "G" 10 Kardus OK Daft "G"	12.350 btr OK daft G 5 dos OK Daft G

Sumber: Hasil Anev Penanganan Kasus Narkoba Sejajaran Polda Jawa Tengah Th. 2000-2004.

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dapat disimpulkan jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan oleh para remaja adalah Ecstasy, Sabu-sabu, dan OK daftar "G". Trend yang terjadi selama kurun waktu lima tahun ini adalah, penyalahgunaan Ecstasy dan sabu-sabu cenderung relatif menurun. Sedangkan penyalahgunaan OK daftar "G" mengalami peningkatan tajam.

Ecstasy bukan nama obat atau bahan kimia, ia merupakan "Street Name" dalam pemasaran, oleh sebab itu nama ini menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi ada yang menggunakan nama atau

istilah lain dari ecstasy antara lain : inex, MDM, Ice, Adam, Essence, XTC, dan Ciu Lin.

Ecstasy merupakan turunan Amphetamine dengan nama kimia N,a, dimetil 3,4-(metilendioksi) finetilamina yang disingkat (MDMA), "sejenis obat perangsang (stimulant) yang membangkitkan rasa ria (euforia), menaikkan gairah yang berlebihan (ecstasy), dan menekan rasa lapar". Obat ini digunakan untuk kepentingan terapi yang diresepkan oleh para psikiater. Ecstasy jenis obat psikotropika sebab bahan yang terkandung di dalamnya yakni "bahan aktif yang berfungsi merangsang maupun menekan aktivitas susunan syaraf pusat". Ecstasy mempunyai potensi halusinasi lebih kuat dari induknya tetapi juga lebih toksik, jika telah ditegaskan bahwa ecstasy itu adalah jenis obat psikotropika, maka pengertian dari psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pasal 1 butir 1 yaitu *zat atau obat", baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku "*. Ecstasy termasuk dalam golongan I (pertama) yaitu obat keras, dilarang peredarannya dan hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi atau pengobatan, karena sindrom ketergantungan sangat kuat, serta membahayakan tubuh manusia (termasuk kesehatan). Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan obat-obat keras, untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap obat-obat keras ini.



Tidak semua zat psikotropika menimbulkan ketergantungan, zat psikotropika sering disebut zat psikoaktif. Ada beberapa zat psikoaktif tertentu yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Ketergantungan zat yaitu suatu keadaan dimana terdapat toleransi dan atau gejala putus (lepas) zat. Ketergantungan zat biasanya timbul sebagai akibat penyalahgunaan zat. Toleransi berarti suatu keadaan dimana untuk memperoleh narkotika dan zat adiktif (zat yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan atau psikologis) lain makin lama diperlukan jumlah yang makin banyak.

Ecstasy yang beredar di pasaran terdiri dari beraneka ragam bentuk, warna dan khasiat. Semua ecstasy yang ada berbentuk pil, ada yang berbentuk hati, memanjang, bulat gepeng (seperti pil-pil lainnya). Ada yang berwarna hitam, hijau lumut, putih, pink, kuning. Tujuan utama dari peningkatan peredaran ecstasy adalah "*bisnis*", seperti juga narkotika, ganja, pil koplo. Dengan memperdagangkan barang tersebut dalam jumlah yang kecil akan berefek peningkatan di bidang finansial secara maksimal.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi sebab penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah ini, dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden penyalahguna/mantan penyalahguna Psikotropika. Responden ini terdiri dari Napi dan bekas tahanan di beberapa tempat di Jawa Tengah. Dalam rangka memperoleh gambaran pelaku-pelaku penyalahgunaan Psikotropika di kalangan

responden penelitian, di bawah ini dikemukakan tabel-tabel yang menyangkut latar belakang sosial responden.

### Latar Belakang Sosial Responden

Tabel 3.5 Klasifikasi Umur Pengguna Psikotropika di Kalangan Remaja Responden Penelitian (N=20)

No	Umur	Jumlah	
		n	%
1	15-17 Tahun	4	20
2	18-20 Tahun	7	35
3	21 Tahun	9	45
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah

N = jumlah responden

Dari tabel diatas, tampak bahwa kelompok umur di kalangan responden penelitian cukup bervariasi.

Kelompok 15-17 Tahun = 20%

Kelompok 18-20 Tahun = 35%

Kelompok 21 Tahun = 45%

Ini menunjukkan bahwa kelompok umur para pelaku tersebar hampir merata.

Responden penelitian ini terdiri dari para remaja dengan *range* umur 15 sampai 21 tahun, Sesuai dengan keputusan WHO membagi kurun usia muda dalam 2 bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda (*youth*).

Responden ini dibagi menjadi tiga kelompok umur untuk memudahkan analisis.

Untuk selanjutnya, dalam rangka memahami latar belakang pendidikan yang pernah dialami responden penelitian, di bawah ini dikemukakan tabel mengenai latar belakang pendidikan di kalangan responden penelitian

Tabel 3.6 Pendidikan Pengguna Psikotropika di Kalangan Remaja  
Responden Penelitian (N=20)

No	Pendidikan	Jumlah	
		n	%
1	SD	1	5
2	SMP	6	30
3	SMA	11	55
4	PT	2	10
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah  
N = jumlah responden

Dari tabel diatas tampak bahwa latar belakang latar belakang dikalangan responden cukup bervariasi, mulai dari SD (5%), SMP (30%), SMA (55%), dan PT (10%). Dari penyebaran tersebut tampak yang perlu memperoleh perhatian adalah para pelaku yang ternyata pernah menempuh pendidikan di SMP dan SMA. Karena, pendidikan penyalahguna terbesar adalah SMA, yaitu 55% dengan 35% diantaranya masih berstatus pelajar SMU. Sedangkan penyalahguna yang masih

berstatus sebagai pelajar SMP dan mahasiswa perguruan tinggi masing-masing sebesar 5% (1 orang pelajar SMP) dan 10% (2 orang mahasiswa).

Rawannya para pelajar dan mahasiswa akan penyebaran dan penggunaan Psikotropika, maka perlu diadakan penyuluhan menyeluruh mengenai Psikotropika. Penyuluhan ini meliputi pengenalan bentuk fisik dan juga akibat-akibat buruk yang dihasilkannya. Tidak kalah pentingnya, penyuluhan mengenai tindakan-tindakan yang dapat mencegah penggunaan Psikotropika dan mengobati si korban.

Di bawah ini dikemukakan status pekerjaan di kalangan responden penelitian, pada saat mereka berurusan dengan hukum (UU Psikotropika). Tabel berikut mengetengahkan status pekerjaan para pengguna Psikotropika kalangan remaja responden penelitian.

Tabel 3.7 Pekerjaan Pengguna Psikotropika di Kalangan Remaja  
Responden Penelitian (N=20)

No	Pekerjaan	Jumlah	
		n	%
1	Pelajar	10	50
2	Swasta	6	30
3	Pengangguran	3	15
4	Wirausaha	1	5
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah  
N = jumlah responden

Dari tabel diatas tampak bahwa status pekerjaan di kalangan responden penelitian cukup bervariasi hanya saja yang perlu perhatian

penyuluhan adalah mereka yang masih berstatus sebagai pelajar (50%) dan swasta (30%).

Tabel 3.8 Tingkat Kecanduan di Kalangan Remaja Responden Penelitian (N=20)

No	Tingkat Kecanduan	Jumlah	
		n	%
1	Belum	11	55
2	Sedikit	5	25
3	Sudah	4	20
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah  
N = jumlah responden

Dari seluruh tampilan tabel diatas (tabel 3.6, tabel 3.7, dan tabel 3.8) dapat dinyatakan bahwa klasifikasi umur di kalangan responden penelitian hampir tersebar merata (dari 15 s/d 21 Tahun). Latar belakang pendidikan kebanyakan pernah sekolah di SMP dan SMA, status para pengguna Psikotropika kebanyakan adalah pelajar dan swasta.

## **B. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Perilaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Responden**

Di bawah ini dikemukakan hasil penyebaran kuisioner di kalangan responden penelitian. Pertama, dikemukakan mengenai pengguna memperoleh Psikotropika, lihat tabel 3.10 dibawah.

Tabel 3.9 Sumber Psikotropika di Kalangan Remaja Responden Penelitian (N=20)

No	Sumber	Jumlah	
		n	%
1	Teman	14	70
2	Orang tak dikenal	1	5
3	Beli Sendiri	5	25
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah  
N= Jumlah Responden

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pergaulan adalah faktor utama penyalahgunaan Psikotropika di kalangan responden penelitian, karena 70% responden memperoleh Psikotropika dari temannya. Sedangkan, 25% responden membeli sendiri Psikotropika, dapat dikatakan bahwa dia memang dengan kesadarannya sendiri mengkonsumsi Psikotropika tanpa paksaan. Tampaknya latar belakang penggunaan Psikotropika di kalangan pelajar remaja lebih karena ingin mengikuti trend pergaulan.

Tabel 3.10 Asal Dana yang dipakai untuk memperoleh Psikotropika di Kalangan Remaja Responden Penelitian (N=20)

No	Sumber Dana	Jumlah	
		n	%
1	Dikasih Teman	9	45
2	Cari Sendiri	11	55
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah  
N = jumlah responden

Pergaulan, tidak diragukan lagi, menjadi salah satu faktor dalam penyalahgunaan Psikotropika di kalangan responden penelitian. Hal ini ditunjukkan oleh tabel diatas, dengan adanya fasilitas dana dari teman mereka (45%), mereka menjadi tidak ragu dalam mempergunakannya untuk membeli Psikotropika. Prosentase terbesar sumber dana adalah dengan mencari sendiri (55%).

Dari tabel 3.10 dan tabel 3.11 tampak bahwa Psikotropika diperoleh dari teman (70%) dan sumber dana dihasilkan dari teman (45%). Ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan Psikotropika adalah pengaruh teman. Pengaruh teman berupa belajar untuk menjadi penyalahgunaan Psikotropika.

Data-data ini apabila dikaitkan dengan teori *defferintial association* terdapat keterikatannya, yaitu sesuai yang dikemukakan Sutherland<sup>59</sup>:

- (1) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari).
- (2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.
- (3) *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak daripada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.

---

<sup>59</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 75-77.

- (4) *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very, complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri toko, membongkar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan dan memperoleh pengalaman.
- (5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain dia dikelilingi oleh orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.
- (6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum, daripada definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi mempelajari tingkah kriminal tergantung pada berapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.
- (7) *Differential associations may vary in frequency, duration priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan



dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti asosiasi/definisi kepada si individu.

- (8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.
- (9) *While criminal behavior is an expression of general needs of values, it is not explained by those general needs and value, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). Pencuri toko mencuri untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Orang-orang lain bekerja untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Motif-motif frustrasi, nafsu untuk mengumpulkan harta serta status sosial, konsep diri yang rendah, semacamnya-menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal.

*Delinquent* muda bukan saja belajar bagaimana mencuri toko, membongkar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan dan memperoleh pengalaman.

Begitu juga yang terjadi dengan para responden yang memperoleh pengaruh dari teman, pada awalnya, mereka mempunyai motif menggunakan Psikotropika yang didapatkan dari temannya, seperti misalnya ingin belajar dengan cara SKS (Sistem Kebut Semalam, dalam

bahasa prokem). Si peniru kemudian belajar cara menggunakannya dengan meminta bantuan temannya, setelah itu dia juga akan belajar bagaimana cara mengatasi sakaw, yaitu dengan tetap mengkonsumsi Psikotropika dan juga menambah dosisnya, dan seterusnya. Semuanya ia peroleh dari proses belajar, dan teman adalah sebagai sumber "ilmunya".

Dari tabel 3.10 tersebut diatas pula dicermati bahwa ada di kalangan remaja responden penelitian yang memperoleh Psikotropika dengan cara membeli sendiri (25%), kemudian ada pula di kalangan remaja responden penelitian yang memperoleh dana untuk mendapatkan Psikotropika dengan cara mencari sendiri (55%). Ini menunjukkan bahwa kondisi para penyalahguna di kalangan remaja responden penelitian sudah agak parah, karena mereka berusaha mencari Psikotropika dengan usaha sendiri dan bisa dikategorikan ketagihan. Kemungkinan besar ini terjadi karena besarnya pengaruh yang ditimbulkan Psikotropika terhadap kondisi kejiwaan remaja. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.11 Reaksi yang dirasakan di Kalangan Remaja Responden Penelitian (N=20)

No	Reaksi yang dirasakan	Jumlah	
		n	%
1	Mendapat Ketenangan	14	70
2	Merasa Hebat	-	-
3	Diterima pergaulan	6	30
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah  
N = jumlah responden

Sebagian besar penyalahguna merasakan ketenangan dengan mengkonsumsi Psikotropika, hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar 70%. Anggapan yang salah dari penyalahguna inilah yang memicu mengapa remaja responden penelitian cenderung mencari jalan pintas permasalahan yang dihadapinya dengan mengkonsumsi Psikotropika. Anggapan salah lainnya adalah bahwa mereka akan diterima dalam pergaulan apabila ikut-ikutan teman-temannya mengkonsumsi Psikotropika.

Sebagian besar remaja menggunakan Psikotropika untuk memperoleh ketenangan, karena hal ini dipelajari dari teman-teman dekat mereka yang menyalahgunakan Psikotropika. Selain itu banyak sekali diantara mereka yang ingin dianggap sebagai teman yang mempunyai rasa solidaritas tinggi, sehingga beranggapan dengan mengikuti langkah mereka yang telah menggunakan ia adalah bagian dari gank.

Diatas setelah diperoleh gambaran tentang pengaruh teman dan sifat kecanduan para penyalahguna Psikotropika untuk selanjutnya akan di paparkan pengaruh orang tua, tanggapan/ reaksi teman-teman dan masyarakat di sekitar para penyalahguna Psikotropika di kalangan remaja responden penelitian.

Pertama-tama akan dikemukakan pengetahuan orang tua terhadap perilaku anaknya menggunakan Psikotropika. Di bawah ini dikemukakan tabel tentang pengetahuan orang tua terhadap perilaku anaknya.

Tabel 3.12 Orang tua Kalangan Remaja Responden Penelitian (N=20)

No	Orang tua	Jumlah	
		n	%
1	Tahu	2	10
2	Tidak Tahu	17	85
3	Acuh tak Acuh	1	5
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah

N = jumlah responden

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 85% orang tua responden tidak mengetahui anaknya menjadi pengguna. Ketidak tahuan ini berhubungan erat dengan tingkat kedekatan hubungan dan komunikasi antara anak pelaku dengan orang tua. Ini menunjukkan semakin tampak secara signifikan bahwa di kalangan remaja pelaku penyalahguna Psikotropika tidak terdapat jalinan hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua mereka. Disamping itu bila diperhatikan tabel diatas, tampak bahwa di kalangan orang tua pelaku ada yang bersikap acuh tak acuh (10%). Hal ini menjadi menarik bila kemudian dikaitkan dengan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi yang menyatakan bahwa bilamana kontrol sosial anak dengan orang tuanya lemah atau hilang, maka besar kecenderungan anak terlibat penyalahgunaan Psikotropika.

Hirschi berpendapat<sup>60</sup> bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Eresco, 1992, hal 15

dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur, yaitu sebagai berikut: *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*. *Attachment*, diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orangtua) atau lembaga (sekolah dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Involvement*, berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. *Commitment*, diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk: pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta. *Belief*, merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi seorang individu dengan lingkungannya.

Hubungan orang tua anak juga bervariasi dari perilaku-perilaku yang menghambat (orang tua sepenuhnya mengontrol anak membuat keputusan-keputusan untuk anaknya) sampai perilaku yang serba boleh (orang tua membiarkan saja anak untuk membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa petunjuk dari pihaknya). Kecemasan anak adalah bahwa ia

tidak tahu apa yang diharapkan darinya dalam hierarki kekuasaan, bahwa ia adalah seorang yang tidak mampu menangani persoalan-persoalan dan bahwa ia adalah seorang yang tidak bertanggung jawab.

Hubungan orang tua-anak yang ideal akan mengurangi kecemasan ini. Kalau kecemasan itu berlangsung terus, maka untuk menguranginya orang yang bersangkutan bisa mengikuti peraturan dengan ketat dan mendominasi orang lain, atau ia mungkin menarik diri sama sekali menolak untuk diatur dan mengatur. Tipikal untuk para remaja responden penelitian ini adalah yang kedua, mereka tahu bahwa perbuatan menyalahgunakan Psikotropika adalah dilarang tetapi mereka menarik diri dari peraturan perundangan yang ada, padahal orang tua mereka tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Hal ini dapat diindikasikan dengan reaksi orang tua mereka marah dan malu ketika mengetahui anaknya adalah penyalahguna ( 60% dan 40%).

Tabel 3.13 Reaksi Teman-teman terhadap remaja di Kalangan Remaja Responden Penelitian (N=20)

No	Tanggapan Teman-Teman	Jumlah	
		n	%
1	Dikucilkan	2	10
2	Dijauhi	4	20
3	Biasa saja	14	70
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah

N = jumlah responden

Pergaulan, seperti yang telah dikemukakan diatas, merupakan pemicu penyalahgunaan ini, sehingga dapat ditebak reaksi dari teman-

teman pengguna sebagian besar adalah biasa saja. Meski bukan dengan teman sesama penggunanya, teman-teman lingkungannya pun banyak yang bersikap biasa saja. Hal ini, secara positif, dapat menunjang proses rehabilitasi si remaja, karena dia tidak akan merasa minder dan mempunyai semangat yang tinggi untuk sembuh. Namun, berbeda dengan sikap biasa yang ditunjukkan oleh sesama pengguna, karena kata yang tepat untuk mereka sebenarnya adalah "tidak peduli" atau "mereka senang karena mempunyai teman sesama pengguna", kalau perlu mereka harus membangun network yang lebih besar lagi sehingga semua orang akan sama-sama mempunyai ketergantungan terhadap Psikotropika.

Dengan sikap yang biasa-biasa saja (70%) terhadap para penyalahguna Psikotropika di kalangan remaja responden penelitian perlu memperoleh perhatian. Apakah mengkonsumsi Psikotropika merupakan model pergaulan di kalangan remaja atau trend anak-anak muda. Apabila jawabannya iya untuk keduanya, maka hal ini kiranya perlu mendapat perhatian dari kalangan pengamat Psikotropika di kalangan remaja.

Kecenderungan semacam tersebut diatas tampaknya terjadi pula di kalangan masyarakat. Hal ini tampak dalam tabel berikut.

Tabel 3.14 Reaksi Masyarakat terhadap Remaja di Kalangan Remaja  
Responden Penelitian (N=20)

No	Tanggapan Masyarakat	Jumlah	
		n	%
1	Dikucilkan	2	10
2	Dijauhi	8	40
3	Biasa saja	10	50
Total		20	100

Sumber: Data primer diolah  
N = jumlah responden

Reaksi yang didapatkan dari masyarakat sekitar juga sangat penting bagi proses penyembuhan si remaja. Sayang sekali masih banyak masyarakat kita yang mengucilkan dan menjauhi si remaja. Akan sangat membantu apabila masyarakat mendukung kesembuhan si remaja dan melibatkannya dalam proses bersosialisasi. Namun, prosentase masyarakat yang bersikap biasa saja (50%) lebih banyak terjadi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dapat bersifat positif dalam mendukung kesembuhan dan pemulihan si remaja, tetapi dapat juga bersifat negatif, dengan kata lain masyarakat tidak lagi peduli terhadap lingkungannya yang sakit. Secara negatif pula, hal ini berdampak pada penegakan hukum Psikotropika di Jawa Tengah.

Dari beberapa tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyalahgunaan Psikotropika di kalangan responden penelitian adalah:



1. Untuk mendapatkan perasaan termasuk, terhitung, diterima sebagai kelompok remaja, Pengaruh teman-teman dan juga untuk mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan.

Hal ini dapat dilihat dari prosentase perolehan Psikotropika dari teman sebesar 70% dan juga perolehan uang untuk konsumsi Psikotropika yang didapatkan dari teman, baik patungan maupun pemberian langsung, sebanyak 45%;

2. Dibujuk oleh pengedar narkoba atau psikotropika bagi pemula.  
Walaupun hanya terdapat 5%, hal ini dapat mewakili faktor dari penyalahgunaan Psikotropika remaja di Jawa Tengah;
3. Sebagai tempat pelarian dari masalah dalam kehidupan si remaja sehingga memperoleh ketenangan, untuk menenangkan diri dari suatu kegagalan, dan untuk menenangkan diri dari suatu kecemasan dan kegelisahan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan prosentase sebesar 70%.
4. Kontrol sosial orang tua terhadap anaknya yang cenderung lemah, hal ini ditunjukkan dengan ketidak tahuan orang tua bahwa anaknya adalah pengguna (85%), orang tua tahu anaknya pengguna (10%), dan orang tua acuh tak acuh (5%).

### **C. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Psikotropika di Jawa Tengah**

Sudah sejak beberapa tahun silam Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang Psikotropika, namun angka penyalahgunaannya kian

melambung tinggi tiap tahunnya. Sehingga perlu diselidiki hambatan-hambatan apa yang dijumpai di lapangan.

Dalam penyidikan kasus Psikotropika terdapat beberapa hambatan yang dijumpai oleh penegak hukum di Jawa Tengah yang berkaitan dengan pengungkapan jaringan peredaran Psikotropika, antara lain faktor Undang-Undang yang berkaitan dengan Penegakan hukum Psikotropika dan faktor diluar Undang-Undang:

1. Penerapan Undang-Undang Penyalahgunaan Psikotropika

Undang-undang yang terkait langsung dengan penegakan penyalahgunaan Psikotropika adalah UU no. 3 th 1997 tentang peradilan anak, UU no. 5 th 1997 tentang Psikotropika, dan UU no. 8 th 1981 tentang KUHP. Berikut ini adalah kelemahan secara yuridis dari Undang-Undang tersebut.

- a. UU no. 5 th 1997

Walaupun Undang-Undang ini telah terbentuk pada tahun 1997, penerapannya masih tergolong baru karena sebelum lahirnya Undang-undang ini, peradilan psikotropika di Jawa Tengah masih menggunakan UU no. 23 th 1992 tentang kesehatan. Dibandingkan dengan UU no. 23 th 1992, UU no. 5 1997 mempunyai kekuatan lebih untuk menjerat para tersangka, hukuman yang dijatuhkan pun akan lebih berat. Dilihat dari sudut perundang-undangan, UU no. 5 th 1997 mengenai Psikotropika memiliki kekhususan sebagai berikut:

- (a) Secara khusus menguraikan tentang obat psikotropika.
- (b) Semua pelaku penyalahgunaan Psikotropika dapat dijerat.
- (c) Hukumannya cukup berat, dapat membuat pelaku menjadi jera.
- (d) Sangat membantu Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum.
- (e) Dapat mengurangi kuantitas pelaku penyalahgunaan Psikotropika, jika melihat ancaman hukumannya cukup berat.

Namun begitu, UU no. 5 th 1997 ini masih memiliki kelemahan-kelemahan secara yuridis, sebagai berikut:

- (a) Tidak ditemui kriteria tentang batasan pemilikan ecstasy.
- (b) Minimum pidana (4 tahun penjara) selain bertentangan dengan konteks aturan umum KUHP hal ini tidak mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, misalkan jika pelakunya hanya terbukti memiliki 1 butir Psikotropika. Sehingga, aparat Penegak Hukum mendapat kesulitan dalam penerapan hukum pidana, karena harus berpatokan pada penetapan hukuman penjara minimal 4 tahun penjara.
- (c) Masih ada jenis tindak pidana Psikotropika yang dasar hukumnya belum jelas, yang diatur hanyalah pengguna/pemakai Psikotropika golongan I. Untuk pemakai Psikotropika golongan II, III dan IV tidak diatur.

Penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak lebih sering terjadi berupa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

pasal 59 ayat (1) ke-1 huruf c dan e UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Pelanggaran terhadap pasal ini lebih sering terjadi karena memang lebih memungkinkan dibandingkan dengan pelanggaran pasal yang lain.

Dalam praktek kelemahan Undang-undang ini dimanfaatkan oleh penyidik untuk merekayasa Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga seolah-olah apa yang terjadi atau faktanya adalah seperti apa yang tertuang dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), padahal kenyatannya tidak demikian. Penyimpangan ini sering terjadi, namun ketika di persidanganpun, Jaksa, Hakim serta terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa, karena baik Jaksa maupun hakim terpaku pada syarat pembuktian. Alat bukti yang ada misalnya dalam kasus yang direkayasa oleh penyidik sudah barang tentu akan mendukung apa yang dibuat oleh penyidik yang merupakan satu korpsnya, karena dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika rata-rata yang menjadi saksi adalah penyidik yang melakukan penangkapan. Hingga kini belum ada aturan hukum yang dapat mengatasi masalah ini.

Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa menggunakan psikotropika diancam pidana. Namun, terdapat ketentuan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai berikut "Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang

psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan". Namun pada kenyataannya, penulis tidak menemukan adanya putusan hakim di Jawa Tengah yang memerintahkan pengguna atau pecandu dalam tindak pidana psikotropika untuk menjalani pengobatan, keputusan yang dijatuhkan hanya berupa pidana. Menurut penulis dalam hal ini disebabkan dalam pasal 41 tersebut di atas hanya disebutkan dengan kata "dapat" sehingga hakim bebas memilih memerintahkan untuk menjalani pengobatan atau tidak, yang jelas dari pengamatan penulis hakim dalam menjatuhkan putusan ini tidak mau repot artinya dengan putusan pidana tanpa mengikutsertakan rehabilitasi. Hal ini disebabkan Biaya rehabilitasi sangat mahal dan dari negara tidak ada dana untuk membiayai rehabilitasi bagi korban.

Dari uraian tersebut di atas sebenarnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan psikotropika sudah diatur dalam undang-undang hanya saja pengaturan perlindungan hukum terhadap korban sangat minim dan membingungkan pelaksanaannya, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa dan hakim. Karena korban penyalahgunaan psikotropika mayoritas dilakukan oleh para remaja atau generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa, maka perlu adanya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum

terhadap korban penyalahgunaan tersebut. Selain itu harus ada perbedaan yang jelas antara pelaku dengan korban dalam kejahatan narkoba dan psikotropika, sehingga tidak membingungkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim).

b. UU no. 3 th 1997

Menurut Undang-undang ini, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari ancaman hukuman maksimum. Sedangkan yang dipakai dalam penegakan Psikotropika adalah pasal 59 UU no. 5 th 1997, memuat ketentuan hukuman minimal adalah 4 tahun.

Penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak lebih sering terjadi berupa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) ke-1 huruf c dan e UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pelanggaran terhadap pasal ini lebih sering terjadi karena memang lebih memungkinkan dibandingkan dengan pelanggaran pasal yang lain.

Persoalan kemudian muncul, karena dalam ketentuan pasal 59 ini terdapat ancaman pidana minimum yaitu 4(empat) tahun. Jadi secara umum, apabila melakukan penyalahgunaan psikotropika selain golongan I tidak akan diterapkan pasal ini, namun demikian apabila penyalahgunaan psikotropika dimana barang buktinya adalah golongan I, maka akan dikenakan pasal 59 ini.

Ancaman pidana minimum ini selain diluar konteks aturan umum KUHP yang tidak mengenal ancaman minimum, timbul persoalan karena terhadap penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak, berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih dari ancaman hukuman maksimum.

Sehubungan dengan hal tersebut persoalan yang timbul tentu saja akan berkisar pada:

- 1). Terhadap pelaku anak-anak, apakah tepat dikenakan ancaman minimum, apalagi dikaitkan dengan status pelaku yang masih anak-anak yang tentu masa depannya akan menjadi tidak menentu, belum lagi bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.
- 2). Terhadap putusan Hakim sudah ada pedoman untuk memutus tidak lebih dari  $\frac{1}{2}$  ancaman maksimum, bagaimana halnya dengan adanya ancaman pidana minimum.
- 3). Terhadap Jaksa Penuntut Umum belum ada pedoman untuk menuntut, apakah dengan ancaman minimum 4 (empat) tahun berarti dengan sendirinya akan berlaku bagi penuntutan untuk tidak boleh menuntut dibawah 2 tahun.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1997 tersebut di atas, karena terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam UU yang bersangkutan, maka dapat

digunakanlah aturan yang terdapat dalam KUHP sebagai UU induknya yakni yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 45 KUHP :

Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, dapatlah hakim Memerintahkan supaya anak yang berslaha itu dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana, atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489,490,492,496,497,503-505,514,517-519,526,531,532,536 dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu 2 tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana yang bersalah itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHP tersebut di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut pasal ini agar orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dijatuhi hukuman harus memenuhi 2 syarat sebagai berikut :
  - Pada waktu dituntut orang itu harus belum dewasa. Yang dimaksudkan "belum dewasa" bagi orang Indonesia menurut LN 1931 BW ialah mereka yang, belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Orang yang belum mencapai 21 tahun tetapi telah kawin kemudian cerai, dianggap belum dewasa.
  - Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang berumur 16 (enambelas) tahun (pada waktu peristiwa pidana itu terjadi).



2. Apabila kedua syarat itu terpenuhi maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan :

- Anak tersebut dikembalikan kepada orangtua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
- Anak itu diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal milik negsrs untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan, bila anak itu telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini dan sebagai recidive (orang yang berulang kali melakukan kejahatan)
- Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman hukuman dikurangi dengan sepertiganya.

Untuk ketiga macam kemungkinan ini kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rohani terdakwa yang masih muda itu. Misalnya hakim berpendapat bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dijatuhi suatu hukuman apapun. Akan tetapi apabila hakim menganggap bahwa anak-anak berumur 13 tahun atau 15 tahun yang melakukan kejahatan itu

telah berakal yang cukup mampu untuk membeda-bedakan, maka pada hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari 2/3 maksimum yang diancamkan.

Pasal 47 KUHP :

- (1) Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum pidana pokok bagi tindak pidana itu dikurangi 1/3 nya.
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan.

Undang-undang Peradilan Anak, dalam hal tertentu tidak operasional, artinya banyak ketentuan-ketentuan yang dipandang terlalu idealis sehingga penerapannya bagi penegak hukum menjadi sangat mustahil.

Namun demikian yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam praktek benar-benar diterapkan sebagaimana dimaksudkan dan dicita-citakan seperti halnya diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Pelaksanaan penegakan hukum Psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah sendiri masih diwarnai ketidak konsistenan aparat penegak hukum. Para remaja ini di jatuhi hukuman pidana berkisar tiga bulan sampai dengan tujuh bulan. Hal ini sangat ironis, karena ada beberapa oknum aparat yang hanya di jatuhi hukuman pidana lima bulan, padahal ia berstatus sebagai pengedar. Rasa

keadilan penegakan hukum Psikotropika di Jawa Tengah masih sangat jauh dari ideal, bagaimana mungkin seorang pengedar yang sudah dewasa dan "melek hukum" dijatuhi pidana seberat para penyalahguna remaja yang notabene masih belum bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Ada kasus dimana beberapa anak penguasa artinya anak pejabat tinggi negara yang tertangkap secara sah dan meyakinkan terbukti dengan didahuluinya bukti permulaan yang cukup. Namun demikian masih banyak kelemahan pada sektor peradilan di berbagai tingkatan, sehingga ini merupakan faktor kelemahan dalam upaya melakukan fungsi sebagai alat negara penegak hukum.

Kepolisian juga menghadapi hal serupa di tubuhnya sendiri (intern Polri) adanya anggota yang secara langsung atau tidak langsung telah ikut serta dalam penyalahgunaan peredaran gelap Psikotropika. Pimpinan Polri di Polda Jawa Tengah telah membuktikan bahwa tertangkapnya AKP Martono HM mantan Kapolsek Semarang tengah juga di proses secara hukum dan mendapatkan vonis hukuman 7 Bulan penjara. Ada kasus pula dimana Polda Jawa Tengah memberhentikan dengan tidak hormat kepada AKP Lintang Sutrisno anggota Polda Jateng yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan selaku pemakai dan pengedar narkoba. Seharusnya, Polri harus selalu

mengedepankan kekonsistennannya dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan personil.

Di tubuh TNI pun ada oknum-oknum penyalahguna Psikotropika, baik pengguna, pengedar, dan backing. TNI lebih bisa menunjukkan kekonsistennannya dalam rangka penegakan hukum Psikotropika dengan menjatuhkan pidana penjara dan memberhentikan para oknum tersebut. Untuk pengedar dan backing TNI divonis satu sampai dua tahun dan kemudian diberhentikan dengan tidak hormat, sedangkan untuk para pengguna diberikan pembinaan dan juga divonis penjara antara lima sampai enam bulan.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Perlindungan hukum dalam hukum pidana diberikan tidak hanya terhadap pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga terhadap korban. Perlindungan terhadap korban secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana walaupun masih kurang sempurna karena dalam praktek sulit untuk dilaksanakan. Pasal tersebut antara lain :

- (1) Pasal 108 ayat I KUHAP tentang laporan dan pengaduan.
- (2) Pasal 80 tentang hak untuk mengajukan permintaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Pasal 98 dan Pasal 99 KUHP tentang hak korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

2. Koordinasi dengan instansi terkait

Dengan segala upaya yang dapat dilakukan Polri berusaha menanggulangi peredaran Psikotropika dengan berbagai razia, operasi, dan penggrebagan. Namun, semua itu tidak memberikan hasil yang maksimal, sebaliknya, dari hari ke hari jumlah pecandu malah terus meningkat.

- a. Kesulitan untuk mendapatkan saksi ahli, hal ini dikarenakan adanya keengganan dari instansi tersebut untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan.
- b. Jumlah barang bukti yang akan di tes ulang untuk menentukan apakah termasuk golongan Psikotropika sangat banyak, sedangkan hasil dari penyidikan di lapangan tidak memadai.
- c. Tidak adanya keseragaman pemahaman permasalahan antara aparat penegak hukum (hakim, jaksa, Polri), terutama dalam menerapkan pasal dalam dakwaan. Sehingga sering menyebabkan tersangka lolos dari sangkaan, hal ini sangat diayangkan mengingat usaha yang telah ditempuh memakan banyak tenaga, waktu, dan dana.
- d. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penyidikan sangat besar, mengingat harga Psikotropika mahal. Para pengedar pun sering

berpindah-pindah tempat dan peredaran Psikotropika berkisar pada tempat-tempat hiburan.

- e. Penyidikan memakan waktu cukup lama, selain itu personil sering dilibatkan pada tugas kepolisian lain hal ini dikarenakan keterbatasan personil.
- f. Tidak jarang dalam penyidikan dapat membahayakan jiwa dan keselamatan petugas sendiri, ketika petugas berhadapan dengan gank atau kelompok pengedar yang sadis atau petugas dijejak dengan menggunakan makanan atau minuman yang mengandung Psikotropika.
- g. Masih adanya anggapan dari sebagian besar masyarakat bahwa penanggulangan Psikotropika merupakan tanggung jawab Polri saja.
- h. Adanya oknum Polisi yang membocorkan rencana operasi Psikotropika dan bahkan sebagai pengkonsumsi Psikotropika sendiri.
- i. Software hukum yang rumit menyulitkan penyidik untuk melengkapi kasus pidana yang dikenakan.
- j. Masih ada pihak luar yang ingin menghambat atau menghalangi tindakan hukum Polisi.
- k. Masih ada pihak luar yang selalu memaksa Polisi untuk menanggukhan, bahkan meminta dibebaskan.

### 3. Masyarakat

- a. Walaupun ada warga masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan ini, mereka cenderung tidak melapor kepada Polisi karena rasa kesetiakawanan.
- b. Adanya kecenderungan sikap dari masyarakat untuk menjauhi bahkan mengucilkan si remaja, padahal hal ini sangat berpengaruh bagi kondisi jiwa si remaja. Seharusnya masyarakat bersifat sebaliknya, dan membantunya untuk sembuh kembali.

### 4. Keluarga si Korban

- a. Masih adanya anggapan bahwa hal ini merupakan aib, sehingga keluarga cenderung menutupi karena takut mendapat tanggapan yang negatif dari masyarakat. Hal ini sangat ironis, karena inti dari proses penyembuhan korban adalah dukungan dari semua pihak. Untuk itu, perlu adanya pelurusan anggapan masyarakat, bahwa hal ini bukanlah aib dan perlu adanya bantuan dari seluruh pihak dalam penegakan penyalahgunaan Psikotropika.
- b. Keluarga tidak segera mengambil tindakan kuratif kepada si remaja, setelah mengetahui ia menyalahgunakan Psikotropika.

Secara umum, hambatan dalam penegakan penyalahgunaan ini disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan Undang-undang yang terkait dengan penegakan penyalahgunaan Psikotropika.

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan Psikotropika di Indonesia, sanksi pidananya sangat ringan. Vonis-vonis semacam itu seolah justru menjadi daya tarik bagi para pemain lain untuk bergabung. Bisnis Psikotropika di Indonesia menjadi sangat menarik karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang relatif kecil. Jika pelaku tertangkap paling hanya dijatuhkan pidana penjara yang sangat ringan. Kemudian ternyata dari dalam penjara pun, ada yang masih bisa menjalankan bisnisnya, semisal yang dilakukan Alip Cahyadi, Yong Andriarama, dan Romi Widjaya.

#### **D. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jawa Tengah Masa Datang**

Berdasarkan Surat keputusan Ketua BAKOLAK INPRES<sup>61</sup> yang merupakan pedoman bagi Instansi-instansi/Departemen serta Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan zat adiktif lainnya secara umum, digolongkan menjadi upaya pencegahan, upaya pengendalian, dan pengawasan jalur resmi, upaya pemberantasan jalur gelap, upaya terapi dan rehabilitas medis, dan upaya rehabilitas sosial, serta upaya pendukung.

##### **1. Upaya pencegahan**

Sasaran upaya pencegahan adalah terciptanya kesadaran akan kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan

<sup>61</sup> Surat Keputusan BAKOLAK INPRES Nomor 6/1971, Nomor Kpts-01/BAKOLAK/III/1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Penetapan "Kebijaksanaan dan Strategi Penanggulangan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.



dan peredaran gelap Psikotropika, agar terbina dan tercipta kondisi, perilaku dan norma hidup sehat bebas psikotropika serta sikap menolak terhadap penyalahgunaannya.

## 2. Upaya Pengendalian dan Pengawasan Jalur Resmi

Sasaran pengendalian dan pengawasan Psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin agar jumlah Psikotropika yang tersedia sesuai dengan kebutuhan nyata.
- b. Menjamin ketetapan dan kerasionalan penggunaannya sehingga tidak menjurus kepada ketergantungan.
- c. Menggunakan psikotropika sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan.
- d. Mencegah kebocoran dari saluran resmi. Ruang lingkup pengendalian dan pengawasan pada jalur resmi mencakup impor-ekspor, penanaman/kultivasi, produksi distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan.

## 3. Upaya Pemberantasan Jalur Gelap

Sasaran upaya pemberantasan jalur gelap antara lain :

- a. Memutus jalur peredaran gelap Psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b. Mengungkap kegiatan sindikat peredaran gelap psikotropika dengan mengetahui modus operandi yang dilakukan.

- c. Mengungkap motivasi yang melatar belakangi peredaran psikotropika.

#### 4. Upaya Terapi dan Rehabilitasi Medis

Terapi dan rehabilitasi medis bertujuan membebaskan korban dari pengaruh ketergantungan terhadap psikotropika dan pengaruh gangguan kesehatan lain agar mampu berfungsi secara normal. Kegiatannya meliputi berbagai aspek medik, edukasional, vokasional dan sosial.

#### 5. Upaya Rehabilitasi Sosial

Sebagai kelanjutan dari upaya terapi dan rehabilitasi medis, maka untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut serta untuk menuntaskan penanganan terhadap para korban penyalahgunaan psikotropika diperlukan upaya rehabilitasi sosial berupa bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan sosial, dengan demikian diharapkan mereka mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam tatanan kehidupan masyarakat.

#### 6. Upaya Pendukung

Untuk menunjang pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika agar dapat lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan berbagai langkah yaitu :

- a. Pengumpulan dan evaluasi data
- b. Pendidikan dan latihan tenaga
- c. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan

#### d. Penelitian dan Pengembangan

Setelah penulis menganalisis data sekunder, dapat disimpulkan bahwa untuk sukses dalam penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah harus melakukan semua kegiatan, baik sarana penal berupa penanganan melalui jalur hukum, dan sarana non-penal meliputi tindakan pre-emptif, preventif, dan represif. Semua kegiatan tadi harus sama-sama dilakukan oleh semua pihak, dari mulai keluarga, sekolah/kampus, kepolisian, kejaksaan, LAPAS, BNN, Ulama dan tokoh masyarakat setempat, dan yang paling berat adalah diri sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

Upaya Represif pada dasarnya adalah dilakukan dalam bentuk kegiatan atau operasi intelijen, operasi pemindahan dan kegiatan pembinaan. Sebagai upaya penyalahgunaan yang bersifat nasional, penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di proses sesuai hukum yang berlaku serta koordinasi dan kerja sama antara instansi-instansi yang bersangkutan, Kerja sama dengan luar negeri, partisipasi masyarakat, Peningkatan kemampuan aparaturnya penegak hukum, Penyempurnaan fasilitas dan perlengkapan, penyuluhan, Meningkatkan pembinaan edukatif, upaya tersebut dilakukan bertujuan disamping untuk menimbulkan efek jera, juga mengungkapkan Modus dan Jaringan, Kemudian dalam proses penyidikan, para pelaku dapat dipilih-pilih sebagai :

##### 1. Pemasok/ Pengimport.

2. Pemakai/ Pengguna.
3. Pengedar/ Pembawa.
4. Produsen.

Upaya Preventif dengan cara mencegah faktor-faktor predisposisi, kontribusi dan faktor pencetus tidak saling berinteraksi, atau dengan kata lain menghilangkan salah satu faktor tersebut yang dilakukan secara bersama-sama secara simultan antar instansi terkait. Kemudian berupaya menghilangkan/ mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

#### Upaya Pre-emptif

1. Dengan tidak melupakan azas mencegah lebih baik daripada timbulnya kejahatan maka penegak hukum dengan melibatkan Instansi Departemen terkait, Organisasi Wanita/ Kepemudaan serta Lembaga Swadaya masyarakat memberikan penerangan serta penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika/ OKT
2. Secara fungsional dan berkala memberikan penerangan terhadap pemuda/ pelajar tentang bahaya penyalahgunaan Obat Keras Tertentu/ psikotropika.
3. Bersama dengan instansi terkait mengadakan pengawasan terhadap pendistribusian Obat Keras Tertentu guna mencegah adanya kebocoran agar tidak terjadi penyalahgunaan.

4. Upaya Pre-emptif dilakukan untuk mencegah timbulnya demand penyalahgunaan jenis Obat Keras Tertentu dengan kata lain meniadakan faktor korelatif Kriminogen sehingga tidak timbul *Police Hazard*.

### **Sarana Penal**

Eksistensi Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 merupakan suatu kondisi kondusif, yang sangat membantu *criminal policy*, baik menyangkut peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan artikulasi fungsional badan-badan resmi yang terdapat dalam *criminal justice system* (Hakim, Jaksa, Polisi). Dengan tujuan agar terciptanya *law enforcement* yang baik menuju tujuan akhir dan utama yaitu *social defence* dan *social welfare (social policy)*. Ketentuan pidana yang digunakan adalah Pasal 59 sampai dengan 72 UU no. 5 tahun 1997. Harus ada penanggulangan dengan sarana penal untuk mengatasi hambatan yang dialami aparat di Jawa Tengah, yang berkaitan dengan kelemahan Undang-Undang no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Seperti yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, UU no. 5 Tahun 1997 ini masih mempunyai kelemahan-kelemahan secara yuridis, yang berdampak negatif terhadap tindakan aparat Jawa Tengah. Langkah penanggulangan secara penal ini adalah dengan mengatasi kelemahan Undang-Undang Psikotropika dalam hal kebijakan formulasi.

Mengingat begitu besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika, maka tidak berlebihan kiranya bila

pemerintah berusaha secara serius dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika. Apabila pemahaman hanya didasarkan atau bertolak dari sifat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika terhadap masyarakat, maka ketentuan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menggunakan ancaman pidana minimum dapat dimengerti, sebagaimana diatur dalam pasal 59 yang berbunyi;

(1) Barang siapa:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau
- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000j00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

Ancaman pidana minimum ini tentu saja tidak sekedar dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga diharapkan memberikan *deterrent effect* kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Namun demikian perlu juga dipertimbangkan, apakah terhadap pelaku kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak juga harus diterapkan dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi tersebut.

Berdasarkan ketentuan lindung-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan peradilan terhadap pelaku tindak pidana yang masih berusia anak-anak. Ketentuan khusus tersebut antara lain siapa yang berhak menangani tindak pidana anak petugas-petugas khusus; adanya pembimbing dari masyarakat, pekerja sosial maupun pekerja sosial sukarela; suasana persidangan; pemeriksaan tertutup; hakim tunggal; masa penahanan yang lebih singkat; hukuman yang lebih ringan.

Namun demikian dengan diterapkannya ketentuan khusus tersebut terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, tidak berarti menjadi garansi keberhasilan.

Bicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum itu. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan,

maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri<sup>62</sup>

Selama ini keberadaan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, kurang mensosialisasi di kalangan masyarakat, yang berharap agar terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dapat dikenakan hukuman setinggi-tingginya.

Di sisi lain, dengan diterapkannya ketentuan khusus UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang memuat ancaman pidana minimum terhadap pelaku kejahatan anak banyak menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena keberadaan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak belum ada kesesuaian, khususnya menyangkut pedoman pembedaannya. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, antara lain menyangkut penerapan hukum. Penerapan hukum yang dimaksudkan di sini adalah kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut dan Hakim untuk memutus ketika terdakwa anak didakwakan dengan pasal UU Psikotropika golongan I yang mengatur tentang ancaman pidana minimum. Padahal dalam UU Peradilan anak hanya diatur tentang Hakim tidak boleh memutus lebih dari setengah dari ancaman maksimum, sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut belum ada pedomannya.

---

<sup>62</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal 23-24.



I.S. Susanto menyatakan kualitas penegakan hukum dipengaruhi. antara lain oleh perundang-undangannya, yang pada dasarnya terhadap undang-undang itu perlu dikaji tentang substansinya, yakni seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan atau manfaat lebih besar dari peraturan atau sebaliknya siapa yang akan dirugikan, apakah undang-undang tersebut cukup adil, apakah sanksinya memadai dan anusiawi, dan sebagainya<sup>63</sup>.

Di sisi lain berbicara tentang Penegakan hukum, maka pembicaraan tidak luput dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana juga mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari, antara lain datang dari keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, disamping ia sendiri juga mempunyai persepsi tersendiri terhadap masalah yang ditanganinya.

Penegakan hukum juga tidak bisa lepas dari bekerjanya suatu sistem peradilan pidana dalam konteks tertentu. Demikian pula dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak. Permasalahan tidak hanya terhenti begitu saja ketika para penegak hukum telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi. lebih jauh dari itu, apakah penegakan hukum tersebut sudah menjadi satu-satunya penyelesaian terbaik.

---

<sup>63</sup> I.S.Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Dalam Masalah-masalah Hukum*, Majalah Hukum Undip No.9 Tahun 1992, hal.17.

Di sisi lain sebagai bagian dari subsistem sosial para penegak hukum tentu saja bukan merupakan robot hukum semata, tetapi juga merupakan individu-individu yang mempunyai kehendak, yang masing-masing mempunyai persepsi yang tidak selalu sama dalam menyikapi suatu permasalahan. Sehingga sudah barang tentu akan mengnasilkan sesuatu yang tidak selamanya sama pula, meskipun atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama.

Bahkan realitas sosial tidak sedikit pula pengaruhnya dalam mengkonstruksikan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak ini. Apalagi kalau dipahami bahwa tindak pidana anak atau juvenile delinquency<sup>64</sup> bukan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu akibat lanjutan dari sebuah realitas sosial.

Pengadilan di Jawa Tengah sendiri tidak pernah menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada anak. Pidana penjara yang dijatuhkan hanya berkisar tiga, lima atau tujuh bulan. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan penegak hukum, yang disebabkan oleh adanya tawar menawar hukum oleh keluarga si korban. Namun begitu, yang perlu mendapat perhatian dari aparat adalah perlindungan kepentingan anak.

Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) dalam pasal-pasalanya menganut beberapa asas, yang

<sup>64</sup> Bahwa secara etimologis Juvenile Delinquency diartikan sebagai kejahatan anak, bandingkan dengan Robert G.Trojanowics dan Merry Morash dalam bukunya Juvenile Delinquency, Concept and Control, Shaw and Mc.Kay, dalam bukunya Juvenile Delinquency Behaviour, dalam Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya, Paulus Hadisuprpto, Penerbit PT.Citra Aditya, Bandung, 1997.

membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, mengingat usianya yang masih belia. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat 1).

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan Anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun; dan belum pernah kawin.

2. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat 2).

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak hanyalah terbatas menyangkut perkara Anak Nakal.

3. Ditangani Pejabat Khusus (Pasal 1 ayat 5, 6 dan 7).

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menentukan perkara Anak Nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti:

- a. Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak, yang diatur dalam pasal 41. untuk dapat menangani kasus anak di tingkat penyidikan, penyidik harus mendapatkan keputusan tersendiri dari Kapolri, bahwa penyidik tersebut adalah penyidik tindak pidana anak;
- b. Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak, dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 53;
- c. Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak. Hanya hakim tertentu saja yang ditunjuk untuk

menyidangkan perkara anak. Hakim tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam pasal 9 dan 10;

d. Balai Pemasyarakatan.

Dalam perkara anak juga terdapat lembaga yang disebut dengan Balai Pemasyarakatan. Keberadaan Balai Pemasyarakatan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak dalam setiap tahap pemeriksaan yang harus dilalui. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU No. 3;

e. Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Pemasyarakatan terhadap terpidana anak, harus disendirikan atau dipisahkan dari pemasyarakatan dewasa. Hal ini dimaksudkan agar *treatment* atau perlakuan terhadap terpidana anak tersebut juga dibedakan dengan terpidana dewasa. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 60. Perbedaannya hanya terletak pada keterlibatan Petugas Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang bertugas membuat studi kemasyarakatan tentang latar belakang si pelaku tindak pidana ini. Petugas pemasyarakatan harus proaktif terhadap setiap tahap pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan vonis oleh hakim. Peran petugas pemasyarakatan ini diatur dalam Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1997

4. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 11).

Undang-undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari: a. pembimbing kemasyarakatan; b. pekerja sosial; dan c. pekerja sosial sukarela.

5. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1).

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga.

6. Keharusan splitsing (Pasal 7).

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat 1).

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14 dan 18).

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat Pengadilan Negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

9. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan 49).

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP.

10. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan 32).

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.

Pada kenyataannya, penerapan Undang-undang diatas sebagai sarana penal, tidak seideal yang diharapkan, karena masih banyak penyimpangan, terutama di wilayah Jawa Tengah. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi di tiap tahap pemeriksaan, antara lain:

1. Pada tahap penyidikan:

Tidak dipisahkan antara tahanan anak dengan tahanan dewasa. Tidak tiap penyidik yang menjadi penyidik dalam perkara anak adalah penyidik yang benar-benar mempunyai minat dan perhatian akan masalah anak.

Tindakan kekerasan yang dilakukan pada saat pemeriksaan, apabila tersangka anak tidak mengakui tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Bahkan, di beberapa kasus tersangka anak sudah mengakui perbuatannya pun tetap ditindak keras.

2. Tahap penuntutan:

Tahanan anak tidak dipisahkan dengan tahanan orang dewasa yakni dititipkan dan dijadikan satu dalam LP Kedung Pane Semarang, karena di kejaksaan sendiri tidak mempunyai ruang khusus tahanan anak

maupun dewasa. Juga tidak setiap jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa anak.

Jaksa penuntut umum sangat jarang menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa tindakan terhadap terdakwa anak. Tuntutan berupa pembedanaan lebih sering dilakukan. Ketidakberanian jaksa penuntut umum untuk menuntut berupa tindakan ini, karena terikat hukum kelembagaan yakni ketidakmandirian seorang Jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana karena putusan dan segala sesuatunya harus bergantung dari putusan pimpinan di atasnya.

### 3. Tahap Pemeriksaan Pengadilan:

Tidak dipisahkan tahanan anak dengan tahanan orang dewasa yakni ditiptikan dan disatukan dalam LP Kedung Pane Semarang, karena di pengadilan sendiri tidak mempunyai ruang khusus untuk tahanan anak maupun dewasa. Juga tidak setiap hakim adalah hakim penuntut umum. Seperti halnya jaksa, Hakim juga sering tidak berani memutus terdakwa anak berupa tindakan. Hal ini terjadi karena hakim juga tidak mau repot-repot. Putusan berupa pembedanaan pelaksanaan atau tindak lanjut dari hakim akan lebih mudah, lagi pula putusan yang dijatuhkan pun relatif ringan, tetapi dilihat dari tujuan pemasyarakatan terhadap anak hal ini kurang dapat diterima, bahkan dapat terjadi sebaliknya.

### 4. Petugas BAPAS

Petugas dari BAPAS tidak selalu mendampingi tiap tahap pemeriksaan. Prakteknya petugas dari pemasyarakatan hanya mengumpulkan data-

data formal saja yang nantinya dijadikan bahan bagi hakim sebelum memutus perkaranya dan Jaksa untuk melakukan tuntutan pidana. Rekomendasi dari BAPAS sering hanya bersifat formalitas saja, sehingga kurang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara, disamping itu Petugas Pemasyarakatan dari BAPAS kurang aktif dalam mendampingi klien di tiap-tiap tahap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan vonis. Petugas juga kurang mengoptimalkan partisipasi orangtua/wali kliennya sehingga riwayat hidup dari klien hasilnya kurang memadai dan tidak akurat.

#### 5. Lembaga Pemasyarakatan

Hingga saat ini belum ada lembaga pemasyarakatan anak di Jawa Tengah. Contohnya, selama ini terpidana anak menjadi satu dengan terpidana dewasa yaitu di LP kelas I A Kedung Pane Semarang.

Fakta diatas dapat diperkuat dengan adanya paparan berikut mengenai cara-cara penanganan para penyalahguna Psikotropika di kalangan remaja responden penelitian dari tabel berikut:

Tabel 3.15 Perlakuan Penegak Hukum terhadap Remaja di Kalangan Remaja Responden Penelitian selama Proses Hukum berlangsung (n=20)

No	Perlakuan Penegak Hukum	Polisi		Jaksa		Hakim	
		n	%	n	%	n	%
1	Maki-maki	-	-	3	15	1	5
2	Menyakiti fisik	10	50	-	-	-	-
3	Baik	10	50	17	85	19	95
Total		20	100	20	100	20	100

Sumber: Data primer diolah  
n = jumlah responden



Perlakuan yang seharusnya diberikan oleh si remaja adalah bersifat membantu menyembuhkan mereka, karena secara hukum anak-anak dianggap belum dewasa sehingga pertanggung jawabannya dalam melakukan suatu tindak pidana masih mendapat kekhususan. Hal ini tidak lain dimaksud untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Para penyidik harus mengacu pada pasal 42 ayat (1) UU no. 3 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa penyidik diwajibkan memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Selain itu, terdapat pula ungkapan pelaku sekaligus sebagai korban, walaupun hal itu tidak berlaku bagi semua pelaku penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan, secara psikososial remaja belum dewasa dan dalam tindakan yang dilakukannya belum bisa dipertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka dapat dikatakan pola penyidikan di Jawa Tengah masih melenceng dari idealisme peradilan hukum anak-anak.

Perlakuan oleh jaksa dan hakim yang ditujukan kepada para penyalahguna sebagian besar adalah baik, mereka berusaha membantu para remaja. Namun, masih ada beberapa yang melenceng dari prosedur yang berlaku dengan memaki-maki si remaja (jaksa 15%, hakim 5%).

Dari tabel diatas tampak bahwa di kalangan remaja responden penelitian secara umum diperlakukan dengan baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hanya perlu diperhatikan bahwa masih ada

responden yang di maki-maki, bahkan disakiti secara fisik oleh pihak kepolisian.

Ketentuan penahanan sebagaimana dimaksud UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tersebut nampaknya dalam kondisi Sistem Peradilan Pidana (SPP) kita yang sekarang ini sulit untuk dilaksanakan. Bagaimana mungkin mereka yang ditahan akan terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan sosialnya. Sulit rasanya, bahkan mereka yang tidak ditahan pun belum tentu dalam kesehariannya mendapatkan jaminan atau dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hemat penulis, secara umum Hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan anggaran negara yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan diatas dan SDM serta sistem yang perlu dibenahi. Untuk itu, pemerintah hendaknya mengalokasikan dana tambahan untuk masalah satu ini karena hal ini menyangkut remaja sebagai generasi bangsa. Penjara adalah sekolah kejahatan, sangat berpotensi bagi remaja untuk meniru dan belajar dari "seniornya" dalam melakukan kejahatan, untuk itu LP harus dipisahkan. Selain itu sistem dibenahi perlu sekali, sehingga jaksa dan hakim bisa lebih independen sehingga dapat menempatkan objektivitas dalam memutus perkara. SDM petugas pun perlu ditingkatkan, dengan adanya pelatihan, sanksi atau sistem komisi misalnya.

### **Sarana Non-Penal**

Menurut hemat penulis, berikut ini adalah sarana non-penal yang dapat diambil dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika.

#### **1. Keluarga**

- a. Orang tua harus membekali diri dengan pengetahuan tentang psikotropika dan bagaimana peredarannya, sehingga dapat membuat mereka sadar bahwa penyalahgunaan psikotropika bisa mengenai siapa saja, termasuk anak-anaknya yang masih kecil, dan hendaknya mereka dapat mencari solusi bersama dalam mendidik anak-anak mereka.
- b. Harus dapat mendeteksi secara dini perilaku anak-anaknya dengan mempelajari gejala-gejala penyalahgunaan psikotropika serta cara penanggulangannya.
- c. Mengembangkan pola asuh otoritatif, menghormati hak anak, menyayangnya, terbuka dan berkomunikasi dengan anak, serta mengembangkan penalaran moral anak.

#### **2. Sekolah/Kampus**

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh sekolah/kampus dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika adalah dengan menciptakan sekolah/kampus yang bebas psikotropika, hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengadakan sidak terhadap barang-barang murid/mahasiswa.
- b. Mengadakan tes urin terhadap murid/mahasiswa baru.

- c. Mengadakan penyuluhan mengenai bahaya Psikotropika dan obat terlarang lainnya
- d. Apabila terdapat murid/mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan Psikotropika, sekolah/kampus hendaknya mempunyai kebijakan memberikan dispensasi dengan mengembalikan mereka kepada orangtua mereka dan memberikan kesempatan belajar kembali setelah pulih. Hal ini dimaksudkan agar para remaja tersebut dapat memiliki masa depan yang cerah kembali.

### 3. Kepolisian

- a. Mengadakan penyuluhan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar dan mahasiswa serta LSM mengenai Psikotropika dan obat terlarang lainnya.
- b. Penyuluhan tidak langsung melalui media massa, penyerahan brosur, leaflet, pemasangan billboard atau spanduk yang berisi pesan-pesan kantibmas.
- c. Kegiatan pengaturan/ penjagaan/ pengawalan/ patroli (turjawali), penempatan Polisi dimana-mana (di jalan-jalan pada jam-jam macet/rawan).
- d. Pengendalian dan pengawasan tempat-tempat rawan atau jalur-jalur peredaran gelap Psikotropika dan obat terlarang lainnya, melakukan kegiatan operasi kepolisian dan operasi terpadu serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah dan masyarakat peduli Kantibmas.

- e. Bertindak tegas terhadap para oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan Psikotropika, baik para oknum pengguna ataupun oknum polisi yang melindungi cukong. Selalu menempatkan konsistensi, terutama dalam menindak oknum polisi, jangan ada toleransi untuk mereka.
- f. Melakukan tindakan Kepolisian secara terkoordinasi antara lain dalam bentuk :
  - (1) Deteksi dini terhadap peredaran psikotropika pada tempat-tempat yang dicurigai.
  - (2) Pengawasan ketat melalui pelabuhan udara/ laut atau kapal berbendera Indonesia yang datang dari luar negeri.
  - (3) Adakan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap jaringan/ sindikat psikotropika.
- g. Menyatakan pendapat/ persepsi dalam penanganan psikotropika bersama-sama dengan instansi terkait khususnya CJS, Balai POM dan Labfor.
- h. Polisi harus berani menindak produsen dan bandar Psikotropika karena secara substansi (materiil) dapat dijangkau oleh penerapan hukum pidana. Sedangkan, selama ini kasus Psikotropika yang ditangani dan ditindak menurut jalur hukum hanya kepada pengedar dan pemasok.

#### 4. Pengadilan

- a. Hendaknya menerapkan UU no 5 th 1997 dalam menjerat para tersangka. Selama ini pengadilan di Jawa Tengah menggunakan UU no 23 th 1992 tentang kesehatan dalam menangani kasus Psikotropika, hal ini menyebabkan pidana penjara yang dijatuhkan sangat ringan jika dibandingkan dengan akibat yang diderita oleh korban karena perbuatannya. Dengan menggunakan UU no 5 th 1997, pidana yang dijatuhkan kepada tersangka akan lebih berat, sehingga dapat memberikan efek jera kepada para tersangka. Walaupun memang hukuman berat yang dijatuhkan kepada tersangka tidak selalu membuat mereka jera, semua kembali kepada pribadi masing-masing tersangka.
- b. Mengadakan komunikasi terpadu atau pertemuan bersama antara aparat penegak hukum dalam rangka menghasilkan kesepakatan dalam menerapkan pasal dakwaan dalam kasus Psikotropika, sehingga tidak ada lagi tersangka yang lolos dari dakwaan hanya karena jaksa atau Polisi salah menerapkan pasal.

#### 5. LAPAS

- a. Memberikan pembinaan kepada para tersangka kasus psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya, dengan melakukan pendekatan secara halus, bukan menggunakan kekerasan.
- b. Meningkatkan keefesienan program-program rehabilitasi Psikotropika.

c. Menindak tegas oknum petugas yang bertindak illegal.

6. BNN

Sebagai lembaga resmi pemerintahan, BNN mempunyai tugas dalam membimbing masyarakat dalam mengetahui semua aspek yang berkaitan dengan Psikotropika dan obat terlarang lainnya. Sudah sejak lama sejak pemberlakuan UU narkotika pertama kali dan pembentukan BNN, namun angka penyalahgunaan Psikotropika dan obat terlarang lainnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu BNN masih harus melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam kebijakan-kebijakannya.

a. Meningkatkan kinerja lembaganya, sehingga menemukan solusi-solusi yang tepat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika.

b. Mengoptimalkan kinerja BNP di daerah-daerah.

7. Ulama dan tokoh masyarakat setempat

a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Psikotropika dan obat terlarang lainnya.

b. Bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk membantu korban penyalahguna Psikotropika, dan bukan malah menjauhi. Mengikut sertakan korban dalam kegiatan-kegiatan bersosialisasi dan terutama kegiatan keagamaan.

- c. Mendirikan tempat-tempat rehabilitasi yang bernuansa agama dengan pengasuh yang handal dan terpercaya. Agama merupakan faktor akselerasi agar terbebas dari pengaruh Psikotropika.
- d. Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dari semua golongan formal/informal hendaknya berpartisipasi dalam:
  - (1) Pembinaan dan pengawasan di lingkungan keluarga dan tempat tinggal.
  - (2) Memberikan informasi kepada Polri tentang orang yang dicurigai sebagai pemasok, pengedar dan pemakai.

#### 8. Remaja

- a. Menghindari perbuatan dan kebiasaan merokok, dan minuman keras.
- b. Mengembangkan diri, harga diri, dan kepercayaan diri.
- c. Mengembangkan cara berpikir alternatif untuk meluruskan keyakinan yang salah.
- d. Selektif dalam memilih atau bergaul dengan teman-teman yang baik. Baik dalam hal, berbuat sesuai dengan hukum, adat, norma yang berlaku dan memiliki potensi diri.
- e. Selalu menanamkan keyakinan agama yang mendalam, sehingga ia akan bertindak berdasarkan pertimbangan baik buruknya, dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya dan mengerjakan segala sesuatu yang di ridhoi-Nya saja.



- f. Mengetahui bahaya, dampak, dan cara-cara peredaran Psikotropika, sehingga ia dapat membentengi diri dari Psikotropika.
- g. Selalu menanamkan pada diri sendiri bahwa penyalahgunaan Psikotropika sangat tidak berguna dan bahwa ia adalah "*one way ticket*" karena dampak-dampak negatif yang ditimbulkan darinya tidak akan pernah bisa diperbaiki kembali.
- h. Selalu menanamkan pada diri pribadi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.
- i. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penulisan tesis ini, didapatkan kesimpulan-kesimpulan, berikut:

##### **1. Gambaran Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jawa Tengah**

Kondisi penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah sangat mengkhawatirkan. Banyak diantara Penyalahguna remaja yang masih berstatus pelajar. Penyalahgunaan ini, jumlah terbesar dilakukan pada taraf konsumsi dan kemudian taraf distribusi. Psikotropika yang banyak disalahgunakan para remaja Jawa Tengah adalah jenis *benzodiazepin* dan *amphetamine*.

##### **2. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jawa Tengah**

Dari kuisisioner yang dihimpun, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Faktor utama yang menjadi penyebab para remaja menggunakan Psikotropika adalah karena pengaruh teman. Para remaja ini menyalahgunakan Psikotropika dengan cara mempelajarinya terlebih dahulu dari temannya atau bisa dikatakan melalui proses belajar dari temannya.
- b. Tujuan dari penyalahgunaan ini adalah untuk memperoleh ketenangan dan dapat diterima dalam pergaulan. Sedangkan yang lebih memprihatinkan banyak diantara remaja ini yang ingin

diterima dalam pergaulannya, hal ini membuktikan bahwa para remaja menggunakan Psikotropika sebagai trend di kalangannya.

- c. Sikap orang tua responden sebagian besar tidak mengetahui bahwa putra mereka menggunakan Psikotropika. Namun ada yang mengetahui dan bersikap acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan lemahnya ikatan sosial orang tua dengan anaknya.
- d. Reaksi dari teman dan masyarakat responden mempunyai peran yang sangat besar dalam proses penyembuhan penyalahguna.
- e. Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam proses penyembuhan penyalahguna adalah Sikap para penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan Psikotropika. Mereka seharusnya berorientasi komunikasi dalam berinteraksi dengan para penyalahguna, bukan dengan kekerasan.

### **3. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Psikotropika di Jawa Tengah**

Hambatan-hambatan yang dijumpai pada penegakan hukum Psikotropika di Jawa Tengah, adalah:

- a. Secara umum bersumber dari kelemahan-kelemahan Undang-Undang Penegakan hukum dan faktor diluar Undang-Undang. Sehingga, aparat penegak hukum merasa kesulitan dalam menerapkannya.
- b. Ketidak konsistenan aparat sendiri dalam menjalankan prosedur hukum yang berlaku. Aturan hukum menjadi tidak berlaku dengan

adil apabila dilakukan oleh oknum aparat, karena masih adanya tawar-menawar hukum didalam tubuh Polri sendiri. Tawar-menawar hukum ini juga terjadi di tubuh pengadilan, sehingga hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan.

#### **4. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jawa Tengah untuk Masa Datang**

##### **a. Sarana Penal**

Dengan menggunakan acuan Undang-Undang tambahan lain, seperti UU no. 3 th 1997 tentang peradilan anak dan UU no. 8 th 1981 tentang KUHAP, yang dapat menanggulangi kelemahan UU no. 5 Tahun 1997. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak pun dapat lebih ringan dari yang telah ditentukan dan kepentingan anak dapat diselamatkan.

##### **b. Sarana Non-Penal**

Sarana non-penal yang diterapkan di Jawa Tengah berbasis komunikasi dua arah yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari keluarga, Sekolah/Kampus, Kepolisian, Pengadilan, LAPAS, BNN, Ulama dan tokoh masyarakat setempat, dan tidak kalah penting adalah Remaja itu sendiri.

### **B. Saran**

Agar proses rehabilitasi Remaja lebih efektif, maka penanganan penyalahguna Psikotropika kalangan remaja di Jawa Tengah, perlu mendapat perhatian yang khusus. Adapun saran-saran, sebagai berikut:

1. Hendaknya semua pihak ikut serta dalam menggalakkan sarana penal dan non-penal dalam penanggulangan Psikotropika di kalangan remaja di Jawa Tengah.
2. Pihak Polisi harus bertindak lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menangani kasus.
3. Para penyidik seharusnya tidak bertindak gegabah dengan "menjebak" penyalahguna hanya untuk memenuhi Target Operasi.
4. Meningkatkan komitmen masing-masing individu dalam memerangi Psikotropika.
5. Masyarakat harus diikut sertakan secara aktif dalam menangani masalah ini, terutama yang menyangkut sarana non-penal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduchanif, Akin A. Gani, tanpa tahun, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika/ Obat Keras dan Penanggulangannya*, Jakarta: B.P. Sandaan.
- Alit, I.G.K., *Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945*, Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 1997.
- Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, edisi revisi 1992.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Grafindo Perkasa, 1998.
- , *Masalah Kebijakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco, 1992.
- , *Problem Kenakalan anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- BAKOLAK INPRES Nomor 6/1971 tentang "Penetapan Kebijaksanaan dan Strategi Penanggulangan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya". Nomor Kpts-01/BAKOLAK/III/1994 tanggal 22 Maret, 1994.
- Becker, Howard S., *Outsiders, Studies In The Sociology Of Deviance*, New York: The Free press, 1973.
- Danny I, Yatim dan Irwanto, *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*, Jakarta: Arçan, 1986.
- Deborah A., Redman, *Economic and the Philosophy of Social Science*, New York: Oxford University Press, 1991.
- Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh*

***Masyarakat Sekolah"***, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Gibbon, Don C., ***Society, Crime and Criminal Behavior***, New Jersey: Prentice Hall, Englewood, 1992.

Goode, Erich, ***Deviant Behaviour***, Prentice Hall Inc, New Jersey: Englewood Cliffs, 1989.

Hadisuprpto, Paulus, ***Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya***, Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya, 1997.

Hamzah, Andi dan R.M. Surahman, ***Kejahatan Narkotika dan Psikotropika***, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hartono, Sunaryati, ***Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20***, Bndung: Alumni, 1994.

Huberman, Miles, ***Qualitative Data Analysis***, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1992.

Hurlock, Elizabeth B., ***Psikologi Perkembangan***, Jakarta: Erlangga, 1980.

Hurwitz, Stephan disadur oleh Ny. Moeljatno, S.H, ***Kriminologi***, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.

Johnson, Alvin S., ***Sosiologi Hukum***, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kaligis, O.C, dkk, ***Narkoba dan Peradilannya di Indonesia***, Bandung: PT Alumni, 2002.

Kartono, Kartini, ***Patologi Sosial***, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

-----, ***Kenakalan Remaja***, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Koswara, ***Teori-teori Kepribadian***, Bandung : PT. Eresco, 1991

Kunarto, Tabah, ***Polisi Harapan & Kenyataan***, Klaten : CV Sahabat, 1995

Kusumohamidjojo, Budiono, ***Filsafat Hukum***, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Leenhowers, ***Manusia dalam Lingkungan, Refleksi Filsafat Tentang Manusia***,

- Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1970.
- Liba, Mastra, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa, 2002.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Moerdiono, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 1995.
- Noach, Simandjuntak, Pasaribu, *Kriminologi*, Bandung : Tarsito, 1984.
- Nonet, Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, New York : Harper and Row Colophon Books, 1978.
- Packer, Herbert L, *The Limit Of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Polri, Mabes, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Mabes Polri, 1997.
- , *Pengalaman Narkotika, Psikotropika, dan Obat Keras lainnya*, Jakarta: Team Labkrim Polri dan Subdit Sersetik Dir Serse Polri, 1986.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosialogis*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Alfabeta, 2004.
- Roesdi, *Narkotika I&II*, Jakarta: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 1990.
- Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Sahetapy, J. E dan Reksodiputro, B. Mardjono, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Sahetapy, J. E, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979.



- , *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983.
- , *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1886.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Santoso, Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1977
- Sinar Grafika, Redaksi, *Undang-Undang Narkotika & Psikotropika*, Sinar Grafika: Jakarta, 1998.
- Sitanggang, B.A, *Masalah Narkotika*, Medan: HOT Dolisaut, 1974.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung : Alumni, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soerjono, *Pengenalan Narkotika, Psikotropika dan Obat keras lainnya*, Jakarta: Disdokes Polri, 1987.
- Soerjono, Liklikuwata, Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soekanto, Liklikuwata, Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Semarang : CV. Agung, 1990.
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia , 1994
- Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Erisco, 1995.

- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT Alumni, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sunarso, Siswantoro, S.H., *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susanto, I.S., *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Dalam Masalah-masalah Hukum*, Majalah Hukum Undip No.9 Tahun 1992.
- , *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1995.
- Suseno, Frans Magnis, *Berfilsafat Dari Konteks*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Sutherland, Edwin H. & Cressey, *Principles Of Criminology*, New York : J. B. Lippincott, Co, 1960.
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Williams, Shane, *Criminology Theory*, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988.
- Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1983
- Kompas, Senin, 26-227-1999
- Makalah BNN
- Buku Pedoman BNN
- Reserse POLRI, 1997, *Penyalahgunaan Ekstacy dan Miras Serta Bahaya HIV/AIDS dikalangan Generasi Muda*, Jakarta: Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945.